



Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan

April 2018

Japan International Cooperation Agency



Booklet ini merupakan rangkuman dari "Tinjauan Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan." JICA menugaskan International Development Center of Japan Inc. (IDCJ), ALMEC Corporation, dan Koei Research & Consulting Inc. (KRC) untuk melakukan kajian tersebut. Laporan lengkap dari tinjauan ini dapat diunduh dari portal perpustakaan JICA di bawah ini.

<https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/index.html>



(Foto: Kenshiro Imamura/JICA)

Pengantar

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan negara multi-etnis, telah membangun negeri dengan semboyan kebangsaan "Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu). Di 50 tahun pertama setelah kemerdekaan, di bawah kepemimpinan yang kuat dari Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, Indonesia terus melakukan pembangunan nasional berdasarkan pilar "Pertumbuhan," "Distribusi" dan "Stabilitas." Jepang pun telah banyak memberikan dukungan terhadap pembangunan tersebut melalui proyek bantuan pembangunan pemerintah (ODA). Meskipun kondisi politik dan ekonomi sempat mengalami ketidakstabilan karena krisis moneter Asia, namun Indonesia tetap melanjutkan pembangunan ekonomi dan sosial yang stabil sejak pertengahan tahun 2000-an, dan bergabung dengan G20 pada tahun 2008. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional, serta menjadi mitra terpercaya Jepang dalam menangani isu-isu global.

Pada buklet ini, kita akan melihat kembali hubungan kemitraan antara kedua negara selama 60 tahun terakhir, dengan fokus kepada ODA Jepang kepada Indonesia.



Tahun 2018 menandai ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Untuk memperingatinya, telah dipilih logo resmi (gambar kanan atas) melalui jajak pendapat publik, dan diselenggarakan berbagai acara peringatan. Logo ini dibuat dengan dasar warna merah dan putih yang digunakan pada bendera kedua negara, dan menggabungkan simbol kedua negara yaitu "Sakura (bunga sakura)" dan "Wayang."

Daftar Isi

—————	1	Penanggulangan Bencana dan Rekonstruksi Pasca Bencana	19
Kerjasama Indonesia dan Jepang Dilihat dalam Angka	2	Sistem Saluran Air dan Pembuangan/ Pengelolaan Limbah	20
Fitur 1: Memberikan Bantuan pada Saat Diperlukan	3-4	Tata Kelola Pemerintahan	21
Riwayat Kerjasama Jepang dan Indonesia	5-6	Pembangunan Daerah	22
Pembangunan Sosial-Ekonomi Indonesia dan Kerjasama Jepang	7-8	Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional	23
Transportasi	9-12	Pendidikan Dasar dan Menengah	24
Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Makro Ekonomi	13	Layanan Kesehatan dan Medis/ Jaminan Sosial	25
Listrik dan Energi	14	Penanggulangan Perubahan Iklim dan Konservasi Lingkungan Alam	26
Pengembangan Sektor Swasta	15	Kolaborasi dengan Berbagai Aktor	27-28
Telekomunikasi	16	Fitur 2: Peringatan Ke-60 Tahun dan Periode Selanjutnya	29-30
Pertanian dan Keamanan Pangan	17	Kerjasama Jepang Dilihat Dalam Data	31-32
Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	18	Beberapa Proyek ODA Jepang yang Dilaksanakan di Indonesia	33-34

(Semua gambar yang sumbernya tidak disebutkan adalah gambar yang diambil oleh tim tinjauan.)

Kerjasama Indonesia dan Jepang Dilihat dalam Angka

Akumulasi Bantuan dari Jepang Melebihi 5,5 Triliun Yen

Hingga tahun 2016 Jepang telah memberikan bantuan dengan jumlah akumulasi lebih dari 5,5 triliun yen (sekitar 668 triliun rupiah atau USD 49,5 miliar*). Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara pemberi bantuan bilateral terbesar, sedangkan bagi Jepang, Indonesia merupakan negara penerima ODA terbesar (berdasarkan akumulasi).

Pembangunan 60% Jalan Lintas Sumatera & Jalan Tol di Wilayah Metropolitan Jakarta

Pembangunan wilayah Pulau Sumatera merupakan salah satu faktor penunjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh jalur lintas Sumatera, jalur utara-selatan yang panjang totalnya 2.500 km, yang mana sekitar 60% dari jalan tersebut dibangun melalui kerjasama dengan Jepang. Selain itu, pembangunan transportasi feri yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, telah berhasil mempersingkat waktu tempuh yang tadinya 5 jam sekali jalan, menjadi kurang dari 2 jam serta jumlah keberangkatan feri pulang-pergi meningkat dari 1 kali per hari menjadi sekitar 100 kali per hari. Hal ini merupakan perbaikan yang sangat besar bagi transportasi yang menghubungkan wilayah ibukota Jakarta dan kawasan industri di sekitarnya dengan pulau Sumatera yang kaya akan mineral dan sumber daya pertanian dan kehutanan.

Dari total jalan tol sepanjang 274 km di wilayah metropolitan Jakarta, sekitar 60% diantaranya dibangun dengan bantuan Jepang (98 km diantaranya hanya berupa rancangannya saja).

Kereta Bawah Tanah Pertama di Indonesia

Untuk meringankan kemacetan lalu lintas yang memburuk seiring pertumbuhan ekonomi dan kenaikan jumlah penduduk, serta untuk mendorong penggunaan transportasi umum, Jepang telah mendukung modernisasi sarana transportasi kereta api di wilayah metropolitan Jakarta sejak tahun 1980-an (sepanjang 126 km, atau 55% dari 230 km) serta pembangunan kereta bawah tanah (MRT: Mass Rapid Transit) pertama di Indonesia.

Pembangunan Fasilitas Tenaga Pembangkit Listrik untuk 20% (11.000 Megawatt) dari Total Kapasitas Listrik Indonesia

Per tahun 2016, total kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh ODA Jepang sebesar 3.948 Megawatt. Bila ditambah dengan proyek IPP (*Independent Power Producer*) (sedang beroperasi) oleh perusahaan Jepang, kapasitasnya akan mencapai 10.963 Megawatt. Ini setara dengan 20% dari total kapasitas listrik di Indonesia

Peningkatan Produktivitas Pertanian dengan Perluasan Area Irigasi Seluas 370.000 Hektar

Sejak tahun 1970-an, Jepang telah melaksanakan pembangunan lebih dari 50 fasilitas irigasi melalui Pinjaman ODA, dan merealisasikan perluasan area irigasi sekitar 370.000 hektar. Hal ini berkontribusi terhadap produksi beras sekitar 2 juta ton/tahun, sehingga juga memberikan dampak yang besar dari sudut pandang ketahanan pangan.

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Telah Digunakan Oleh Lebih dari 80% Ibu di seluruh Indonesia

Buku KIA yang diperkenalkan atas bantuan Jepang pada tahun 1994, pada tahun 2016 telah digunakan dan disosialisasikan ke lebih dari 80% ibu (hamil, bersalin, dan nifas) di seluruh Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak melalui persalinan yang aman dan vaksinasi anak. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran anak) turun dari 430 orang pada tahun 1990 menjadi 126 orang pada tahun 2015 (WHO).

Bantuan Tepat Waktu Saat Terjadi Bencana Alam Berskala Besar

Menanggapi bencana yang terjadi secara beruntun, yaitu gempa bumi besar di Pulau Sumatera & tsunami di Samudera Hindia (tahun 2004), gempa bumi di Jawa Tengah (tahun 2006), gempa bumi di Padang (tahun 2009), Jepang memberikan bantuan secara cepat mulai dari pengiriman tim bantuan darurat sampai pemulihan dan rekonstruksi. Khusus untuk Aceh, Jepang memberikan bantuan yang komprehensif di berbagai bidang termasuk pengetahuan kebencanaan, dimulai dari bantuan untuk pemulihan infrastruktur melalui bantuan hibah sebesar 14,6 miliar yen (USD 130 juta*) dan bantuan untuk rekonstruksi melalui Pinjaman Yen sebesar 11,6 miliar yen (USD 103 juta*).

Bantuan Dengan Jumlah Lebih Dari 156 Miliar Yen untuk Konservasi Lingkungan Alam dan Penanggulangan Perubahan Iklim

Sejak tahun 1970-an, Jepang secara berkesinambungan memberikan bantuan di bidang konservasi lingkungan alam seperti pengembangan industri kehutanan, keanekaragaman hayati, pencegahan kebakaran hutan, dan konservasi pesisir, sehingga jumlah akumulatif Pinjaman Yen dan Bantuan Hibah lebih dari 156 miliar yen (USD 1,4 miliar*). Contohnya di Pulau Bali, diberikan bantuan untuk pendirian Pusat Informasi Mangrove dan penanaman ulang mangrove di area 4.000 hektar secara nasional. Selain itu, membantu pendirian Pusat Penelitian Bioteknologi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang memiliki jumlah spesimen tanaman mencapai 737.550 jenis (pada tahun 2010), yang merupakan jumlah terbesar di dunia. Jumlah di atas sudah termasuk 95,4 miliar yen (USD 850 juta*) melalui Pinjaman Program Perubahan Iklim (2008-2010).

Pelaksanaan Pelatihan JICA dengan Total Peserta Lebih dari 40.000 Orang

Sejak tahun 1954 telah dilakukan pelatihan baik di Jepang maupun di Indonesia untuk pemerintah maupun instansi publik dengan peserta pelatihan total lebih dari 40.000 orang, sehingga Jepang telah berkontribusi terhadap pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan Indonesia (termasuk menerima sejumlah orang peserta pelatihan dari negara ketiga di Indonesia). Selain itu, jumlah mahasiswa yang belajar di Jepang dengan bantuan pinjaman yen dan program JICA lainnya mencapai lebih dari 3.000 orang, terutama dari kalangan dosen dan pegawai negeri sipil.

*Dikonversikan dari jumlah kumulatif dalam yen pada nilai tukar mata uang tertanggal 1 Desember 2017. Oleh karena itu, jumlah kumulatif dalam dolar AS disini berbeda dari total pencairan berdasarkan standar pelaporan oleh Komite Bantuan Pembangunan di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD-DAC: Development Assistance Committee in Organization for Economic Cooperation Development).
Sumber: Jumlah kumulatif adalah total jumlah kumulatif hingga tahun anggaran 2015 yang ditampilkan di Kementerian Luar Negeri Jepang "Data ODA Jepang per Negara" (pinjaman dan bantuan hibah berdasarkan Pertukaran Nota dan Kerjasama Teknik yang telah disalurkan) dan jumlah keseluruhan nilai program JICA dari tahun anggaran 2016 yang ditunjukkan dalam JICA "Laporan Tahunan 2017" (termasuk Kerjasama Teknik, pinjaman yang telah disalurkan dan hibah berdasarkan Perjanjian Hibah yang baru disahkan). Data yang lainnya diperoleh dari Laporan Akhir JICA "Tinjauan Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan," Tahun 2018.

Memberikan Bantuan pada Saat Diperlukan

Bantuan Jepang untuk Demokratisasi — Makna Dukungan Demokratisasi pada Era yang Bergejolak

Seiring terjadinya krisis moneter Asia pada tahun 1997, rezim Soeharto runtuh pada tahun 1998. Indonesia memasuki masa gejolak politik dan ekonomi, dan mencapai titik balik demokratisasi yang besar. Pada era ini, Jepang sebagai negara tetangga di Asia, mendampingi Indonesia dan memberikan dukungan pembangunan kembali ekonomi dan demokratisasi.



Kampanye untuk Pemilihan Presiden Tahun 2004 (Foto: EPA=JUI)

Demokratisasi Indonesia

Pemilihan umum tahun 1999 merupakan pemilihan yang dilakukan dengan diikuti oleh partai-partai politik secara bebas untuk pertama kalinya dalam 44 tahun, di mana hal ini tonggak penting reformasi politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Habibie sejak pelantikannya di bulan Mei 1998. Setelah itu, Indonesia melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar dari tahun 1999 hingga tahun 2002 untuk mengurangi kewenangan Presiden, serta memperkenalkan parlemen yang demokratis dan sistem pemilu dan pengenalan hak-hak warga negara. Kemudian pada saat bersamaan, dilakukan pemisahan kepolisian dari tentara nasional, reformasi sistem peradilan dan kebebasan media. Konflik regional terjadi di berbagai tempat dan pada tahun 2002 dengan terjadinya serangan teroris bom Bali, saat itu merupakan era di mana keamanan dalam negeri pun dalam keadaan tidak stabil. Pada kondisi seperti ini, dimulai dengan bantuan untuk pemilu tahun 1999, Jepang mulai melakukan satu demi satu kerjasama untuk mendukung demokratisasi seperti bantuan terhadap reformasi kepolisian, hukum dan peradilan.

Terutama, 2 kali bantuan pada pemilu tahun 1999 dan 2004 memiliki skala yang besar dalam kontribusi secara jumlah uang dan sumber daya manusia melalui bantuan para tenaga ahli, yang bermakna penting dalam mendukung momentum demokratisasi. Pada fase penting ini dimana semua mitra donor juga memberikan bantuan, Jepang memberikan bantuan sebesar USD 35 juta atau sekitar sepertiga dari total donasi pada pemilu tahun 1999. Kemudian pada pemilu tahun 2004 pun, memberikan dana sebesar USD 23 juta atau sekitar seperempat dari total donasi, yang menunjukkan keberadaan penting Jepang sebagai donatur utama.

Bantuan All Japan untuk Pemilu

Pada bulan Juni 2004, majalah humas JICA saat itu, yaitu "JICA FRONTIER" membuat artikel *feature* sebanyak 12 halaman dengan judul "Bantuan untuk Pemilu dan Demokratisasi Indonesia." Merupakan hal yang sangat jarang bagi majalah humas JICA untuk membuat *feature* yang menampilkan satu tema tertentu dari satu negara. Di dalamnya, berita mengenai berbagai kesulitan seperti kartu pemilih dan surat suara yang belum sampai pada hari pemilihan, upaya melindungi tempat pemungutan suara dan surat suara dari hujan besar dan tanah longsor, telah dipaparkan dari berbagai cerita para tenaga ahli JICA yang dikirim untuk membantu Komisi Pemilihan Umum serta anggotanya.

Pemilihan umum tahun 2004 adalah pemilu pertama setelah serangkaian amandemen konstitusi dan merupakan pemilu berskala besar dan kompleks, karena secara bersamaan dilakukan 4 kali pemilihan pada bulan April, yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru dibentuk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II. Pada skala ini, terdapat sekitar 150 juta orang pemilih, 590 ribu tempat pemungutan suara dan sekitar 660 juta surat suara di seluruh Indonesia. Kemudian pada bulan Juli, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (pemungutan suara putaran kedua pada bulan September). Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu, Jepang telah mengarahkan segala bentuk skema bantuan (*All Japan*).

Garis Besar Bantuan Pemilu

Tahun	Bantuan
1999	<ul style="list-style-type: none"> •Menyediakan dana melalui UNDP sekitar USD 35 juta (bantuan hibah darurat) •Pengiriman tim pemantau pemilu
2004	<ul style="list-style-type: none"> •Menyediakan 620.000 kotak suara dan sekitar 1,22 juta bilik suara (sekitar USD 22 juta bantuan hibah non-proyek) •Pengiriman tenaga ahli (1 orang jangka panjang, 24 orang jangka pendek - 16 orang untuk pemilu, 4 orang untuk pemilihan presiden dan 4 orang untuk pemilihan presiden putaran kedua) •Bantuan hibah 9 proyek akar rumput/Grassroot Project (pelatihan bagi para pemilih oleh LSM lokal) berjumlah sekitar USD 490.000

(Sumber: Laporan JICA)



1,2: Suasana pemungutan suara di bilik pemungutan suara yang ditempel stiker Jepang (Foto: Japan International Cooperation System)

Suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Provinsi Jawa Timur, pemilihan presiden bulan Juli 2004)

Pada pemilu tahun 2004, Jepang memberikan 620.000 kotak suara dan sekitar 1,22 juta bilik suara. Dipilih dari bahan logam yang kuat dan bisa dilipat, agar dapat digunakan kembali pada pemilu berikutnya. Bilik pemungutan suara dan kotak suara dengan stiker ODA Jepang ini kemudian di distribusikan ke 20 provinsi dari keseluruhan 33 provinsi, dan bentuk dukungan Jepang yang nyata ("visible Japanese aid") ini memberikan dampak besar terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu.

Pada kedua pemilihan tersebut, tim yang terdiri dari 1 orang yaitu tenaga ahli bantuan pemilu dan 1 relawan muda OB/OG dari JOVC (Japan Overseas Cooperation Volunteers) yang sudah mengenal Indonesia dengan baik, dikirim ke Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah (pada tahun 2004, dikirim ke 6 wilayah nasional yang menjangkau 24 provinsi) untuk memberikan bantuan logistik seperti pendistribusian barang-barang pemilu serta memberikan pelatihan bagi para staf. Pemerintah Indonesia mengapresiasi hal ini dengan mengatakan bahwa "Perserikatan Bangsa-Bangsa fokus memberikan bantuan ke wilayah konflik yang menjadi sorotan media, sedangkan Jepang meskipun tidak mencolok, namun merupakan satu-satunya negara yang memberikan bantuan dengan mengirimkan sumber daya manusianya ke daerah-daerah. Indonesia memiliki kondisi yang berbeda-beda di setiap provinsinya, untuk itu kami mengucapkan terima kasih karena para tenaga ahli JICA telah menjalankan tugasnya dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah provinsi. (Wakil Sekretaris Komisi Pemilihan Umum pada saat itu. Dari artikel JICA FRONTIER, 2004).

Bantuan Pembuatan Daftar Pemilih

Pemilu 2004 diramaikan dengan pemberitaan media terkait dengan keterlambatan persiapan daftar pemilih. Saat itu, daftar pemilih tidak diperbarui dengan baik, sehingga banyak nama yang terdaftar rangkap atau bahkan belum terdaftar. Untuk melaksanakan pemilu secara adil, Pemerintah merasa perlunya adanya diadakan segera sensus penduduk guna pembuatan ulang daftar pemilih.

Sementara itu, Jepang selama bertahun-tahun telah membantu Indonesia dalam bidang statistik, dengan menyediakan 79 unit alat pembaca karakter optik (OCR : Optical Character Reader) ke Badan Pusat Statistik (BPS) pada sensus penduduk tahun 2000, serta mengirimkan juga tenaga ahli JICA ke BPS. Dari keberhasilan sensus penduduk dan keberadaan OCR yang dapat melakukan penghitungan secara cepat, Presiden Megawati meminta BPS untuk melakukan survei penduduk guna pembuatan daftar pemilih, dan Jepang pun memberikan bantuan dalam hal ini.

Selain tenaga ahli JICA yang saat itu sudah ditempatkan di BPS sebagai penasihat teknis, Jepang memberikan bantuannya dengan melakukan perbaikan terhadap unit-unit OCR yang ada, juga mengadakan 300 unit komputer baru untuk mempercepat proses penghitungan. Hasilnya, jumlah penduduk dan jumlah pemilih diumumkan secara resmi pada tanggal 1 Maret 2004, dan pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana pada tanggal 5 April. Hampir tidak ada keberatan mengenai daftar pemilih dan hal ini memberikan kontribusi terhadap pengakuan hasil pemilu yang adil. Data jumlah penduduk ini tidak hanya digunakan untuk pemilu berikutnya, namun juga menjadi *database* populasi penduduk yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan Survei Opini Publik/ Jajak Pendapat

Hingga tahun 2003, di Indonesia tidak pernah dilakukan survei opini publik/ jajak pendapat yang ditujukan bagi seluruh wilayah. Metode survei yang digunakan oleh perusahaan penerbit surat kabar atau lainnya adalah wawancara melalui telepon. Saat itu jumlah penduduk yang memiliki telepon tidak lebih dari 5%, sehingga sulit untuk memahami pendapat masyarakat secara akurat.

Sebagai bantuan terhadap kebijakan ekonomi, sejak tahun 2001 JICA melakukan dialog dengan 6 tokoh akademisi yang bertujuan untuk pemulihan dan stabilitas ekonomi. Pada dialog tersebut, demokratisasi juga menjadi salah satu topiknya. Atas usulan dari peserta dialog, yaitu Bapak Heri Ahmadi (Anggota Parlemen) dan Prof. Takashi Shiraishi (saat ini menjabat sebagai Presiden Institute of Developing Economies JETRO), didirikanlah lembaga untuk mengadakan survei opini publik secara independen bernama Lembaga Survei Indonesia (LSI), dengan dukungan JICA.

LSI telah mengadakan 7 kali jajak pendapat sejak bulan Agustus 2003 hingga bulan September 2004, termasuk sebelum dan sesudah pemilihan presiden. Jumlah sampel sekitar 2.200 orang di seluruh Indonesia. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan responden yang dipilih secara acak per kategori di setiap wilayah, yang hasilnya dianalisa secara tabulasi silang untuk mengetahui secara terperinci pendapat setiap lapisan masyarakat. JICA memberikan saran mengenai pengelolaan organisasi dan metode survei LSI, serta menyediakan dana juga. Siaran pers dari hasil survei tersebut, selalu menarik perhatian dan disorot oleh media utama surat kabar, dan program televisi.

Survei opini publik oleh LSI, merupakan percobaan pertama pelaksanaan survei dengan akurasi tinggi di Indonesia. Melalui survei opini publik, dapat dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja birokrasi, dapat diketahui dengan jelas apa yang diinginkan masyarakat terhadap politik, dan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa hal tersebut juga terkait dengan penangan pemerintah terhadap ketegangan yang ada. Sebagai dampaknya, di Indonesia menjadi banyak didirikan lembaga survei opini publik oleh sumber daya manusia yang pernah berpengalaman di LSI.

Sebagai tonggak sejarah untuk menegakkan demokratisasi di Indonesia, pemilu tahun 2004 sangat penting bagi politik internasional dan mendapatkan perhatian yang besar. Kedua pemilu tersebut dilaksanakan secara bebas dan adil dengan tingkat suara yang tinggi. Di bawah pemerintahan Yudhoyono yang lahir dari hasil pemilihan tersebut, Indonesia telah mencapai periode sosial politik yang stabil, yang menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin demokrasi di masyarakat internasional. Mr. Jun Honna, yang saat itu terlibat dalam bantuan survei opini publik dan pemantauan pemilu di Indonesia (saat ini Profesor di Universitas Ritsumeikan), mengatakan "Apabila peralihan ke demokratisasi tidak berjalan dengan stabil, maka ada kekhawatiran Indonesia akan menjadi terpecah-belah seperti halnya Semenanjung Balkan. Jepang memainkan peranan yang sangat besar dalam peralihan menuju demokratisasi Indonesia yang stabil. Jepang sebagai negara demokrasi tertua di Asia dan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, sebagai mitra, perlu bagi kedua negara untuk lebih mendorong demokrasi di Asia dan meningkatkan kualitas demokrasi."

Sebagaimana ditunjukkan di dalam setiap bagian buklet ini, dalam kerjasama antara Indonesia dan Jepang selama 60 tahun terakhir telah dilaksanakan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia pada setiap masanya, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah, bantuan terhadap kebijakan ekonomi, tanggap darurat bencana alam & pemulihan dari bencana. Salah satu contoh bantuan yang paling baik dalam hal ini adalah bantuan terhadap demokratisasi.

Riwayat Kerjasama Jepang dan Indonesia

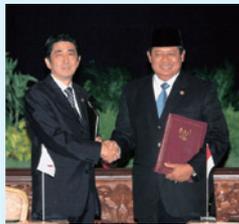
Setelah kemerdekaannya, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia bekerja keras membangun gedung-gedung nasional di tengah berbagai kesulitan yang dihadapinya. Ketika perjanjian pampasan perang diberlakukan diantara kedua negara pada tahun 1958, dilaksanakan proyek-proyek seperti pembangunan bendungan multi-fungsi, pembangunan pabrik dan sebagainya dengan menggunakan dana pampasan perang tersebut.

Dengan dilantiknya Presiden Soeharto, pembangunan infrastruktur ditekankan untuk mendukung tulang punggung perekonomian nasional, Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama hampir 30 tahun. Pada kurun waktu tersebut, ada masa di mana Indonesia terpaksa harus melepaskan diri dari ketergantungan sumber daya dan melakukan reformasi struktur ekonomi, dan pada saat itu pun, Jepang memberikan dukungan melalui pengadaan pinjaman komoditas.

		Hingga Tahun 1960-an	Tahun 1970-an dan Paruh Pertama Tahun 1980-an	Paruh Kedua Tahun 1980-an
Indonesia	Klasifikasi periode	Periode Konstruksi Nasional	Periode Pembangunan Ekonomi	Periode Penyesuaian Struktural
	Peristiwa	1945: Proklamasi Kemerdekaan 1955: Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung 1962: Penyelenggaraan Asian Games ke-4 1963: Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 1967: Pembentukan IGGI (Kelompok Antar Pemerintah Pemberi Bantuan bagi Indonesia) 1968: Pelantikan Presiden Soeharto 1969: Dimulainya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)	1971: Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama setelah Tahun 1955 1975: Krisis Pertamina 1976: Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Pertama ASEAN 1982: Keterlibatan militer dalam politik melalui "Undang-Undang Tentara Nasional yang Baru" 1984: Pencapaian Swasembada Beras	1986: Krisis Neraca Pembayaran Internasional
Jepang	Hubungan dengan Indonesia	1954: Dimulainya penerimaan pelatihan di Jepang 1957: Dimulainya pengiriman tenaga ahli Jepang 1958: Penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan 1960: Para pelajar belajar ke Jepang dengan dana pampasan 1963: Pembentukan Persatuan Alumni Dari Jepang (Persada) 1968: Dimulainya pemberian Pinjaman ODA dan Bantuan Hibah untuk Indonesia	1970: Berakhirnya periode hibah berdasarkan Perjanjian Pampasan 1974: Peristiwa Malaria (kerusuhan anti Jepang) 1977: "Doktrin Fukuda" 1981: Perjanjian Kerjasama Sains dan Teknologi	1986: Pendirian Universitas Dharma Persada oleh alumni pelajar Indonesia yang belajar ke Jepang 1988: Dimulainya penugasan Tenaga Ahli Muda (JOCV: Japan Overseas Cooperation Volunteers) di Indonesia
	Capaian Kerjasama yang Representatif	1968~: Pinjaman Komoditas 1968~: Bendungan Multifungsi Karangates, Kali Konto, Riam Kanan 1968~: Jaringan Microwave di Bagian Timur 1969: Pembangunan Pembangkit Listrik Termal Tanjung Priuk 1969~: Bantuan Keluarga Berencana	1970~: Pengadaan Air Bersih Jakarta 1972~: Pemeliharaan Situs Sejarah Taman Candi Borobudur 1973~: Perluasan Jaringan Penyiaran Radio 1976~: Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Aluminium Asahan 1977~: Pelabuhan Muara Baru Jakarta 1981~: Kerjasama Umbrella untuk Pertanian dan Pembangunan Daerah Terpadu 1982~: Pembangunan Irigasi Komering 1983~: Proyek Pembangunan Pelabuhan Dumai	1986~: Proyek Pembangunan Bandar Udara Bali 1986~: Modernisasi Kereta Api di Wilayah Jabotabek 1986~: Penguatan Balai Inseminasi Buatan 1987~: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 1988~: Pinjaman Program Sektorial 1989~: Pembangunan Dasar Pembuatan Vaksin Polio dan Campak di dalam negeri
		 <p>Para teknisi yang bergembira dapat menembus terowongan drainase bendungan (Pengembangan Daerah Aliran Sungai Brantas) (Foto: Nippon Koei Co., Ltd.)</p>	 <p>Pemeliharaan Situs Sejarah Taman Candi Borobudur</p>	 <p>Proyek Jalan Layang Simpang Semanggi (Foto: Kenshiro Imamura/JICA)</p>
Tren Internasional	Peristiwa	Perang Dingin Timur-Barat Revolusi Hijau 1955: Konferensi Asia-Afrika Bandung 1967: Pembentukan ASEAN	1971: Normalisasi Hubungan Diplomatik Jepang-China 1973, 1979: Krisis Minyak 1975: Berakhirnya Perang Vietnam 1979: Invasi Uni Soviet ke Afghanistan	1985: Perjanjian Plaza 1986: Reverse Oil-Shock 1989: Insiden Lapangan Tiananmen China 1989: Pembentukan APEC 1989: Berakhirnya Perang Dingin

Setelah krisis moneter Asia pada tahun 1997, terjadi gelombang demokratisasi dan desentralisasi. Meskipun kondisi politik dan ekonomi sempat mengalami kekacauan, namun di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dipilih melalui pemilihan secara langsung untuk pertamakalinya, Indonesia kembali lagi ke jalur pertumbuhan ekonomi yang stabil. Melalui dialog kebijakan, Jepang telah memberikan dukungan yang luas dalam pengembangan infrastruktur di wilayah metropolitan Jakarta, menuju pertumbuhan secara berkelanjutan yang dipimpin sektor swasta.

Dari pertengahan tahun 2000-an, pendapatan per kapita pun semakin meningkat, dan pada tahun 2008 Indonesia menjadi anggota G20 yang merupakan satu-satunya negara dari ASEAN. Untuk ke depannya, diharapkan kedua negara dapat bergandengan tangan untuk mengatasi tantangan di kawasan Asia dan isu-isu masyarakat global, seperti langkah-langkah untuk perubahan iklim dan lain-lain.

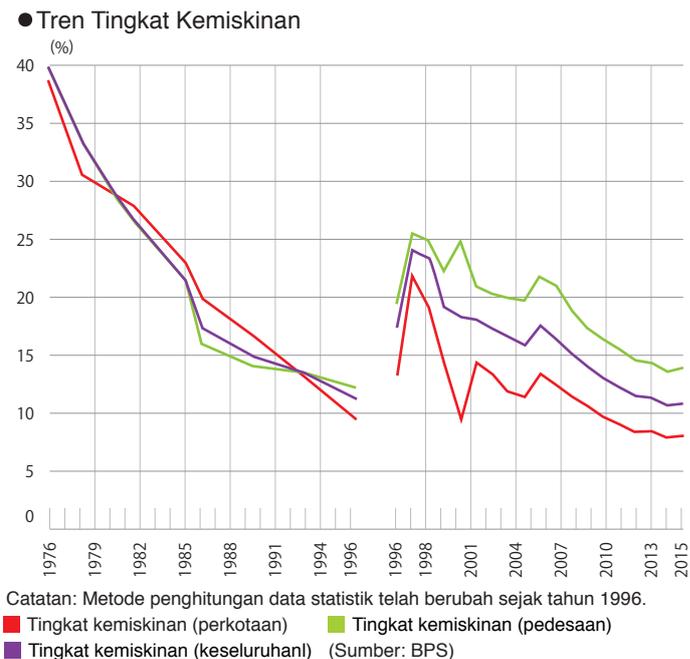
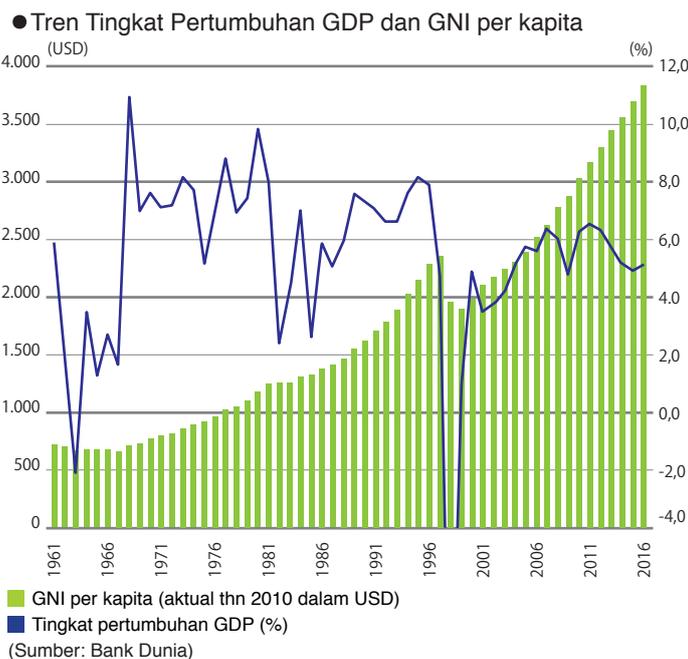
Tahun 1990-an	Sejak Akhir Tahun 1990-an	Sejak Akhir Tahun 2000-an
<p>Masa Pertumbuhan sampai Krisis Ekonomi Asia</p>	<p>Periode Demokratisasi dan Desentralisasi</p>	<p>Periode Menuju Negara Berpenghasilan Menengah</p>
<p>1990: Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan China 1992: Pembentukan Consultative Group on Indonesia (CGI) 1994: Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC Ke-2 1997: Peralihan ke Sistem Harga Pasar Fluktuatif 1998: Presiden Soeharto mengundurkan diri</p>	<p>1999~2002: Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (4 kali) 2000: Pemisahan Polisi Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia 2003: Berakhirnya Program Bantuan IMF 2004: Terpilihnya Presiden Yudhoyono melalui pemilihan presiden secara langsung 2004: Terpilihnya Presiden Yudhoyono melalui pemilihan presiden secara langsung 2006: Bencana Gempa Bumi di Jawa Tengah 2007: Pembubaran CGI</p>	<p>2008: Masuk menjadi anggota G20 2009: Jakarta Commitment 2018: Penyelenggaraan Asian Games ke-18</p>
<p>1998: New Miyazawa Initiative 1998: Dimulainya penugasan Tenaga Ahli Silver (SV) di Indonesia</p>	<p>2003: Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Khusus Jepang-ASEAN sebagai <i>co-chair</i> 2004: Pembentukan Forum Investasi Gabungan Pemerintah dan Swasta Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia</p>  <p>Konferensi Tingkat Tinggi Khusus Jepang-ASEAN (Tahun 2003) (Foto: Biro Humas Kabinet Jepang)</p>	<p>2008: Mulai diberlakukannya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang</p>  <p>Perdana Menteri Abe dan Presiden Yudhoyono berjabat tangan setelah penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (Foto: Biro Humas Kabinet Jepang)</p>
<p>1991~: Pinjaman Sektor Angkutan Laut di Indonesia bagian Timur 1993~: Memastikan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Proyek Buku Kesehatan Ibu & Anak 1994~: Proyek Rel Ganda Kereta Lintas Utama Utara Cikampek- Cirebon 1995~: Pembangunan & Konstruksi Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia 1996~: Proyek Pelindungan Pantai Bali 1997~: Proyek Penguatan Masyarakat Desa untuk Mendukung Program Pemberantasan Kemiskinan di Sulawesi</p>  <p>Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Foto: Kenshiro Imamura/JICA)</p>	<p>1999, 2004: Bantuan Pemilu 2001~: Bantuan Kebijakan Ekonomi 2001~: Program Bantuan Reformasi Kepolisian Nasional 2003~: Penguatan Jejaring Pendidikan Tinggi melalui ASEAN University Network/ Proyek Pengembangan Pendidikan Keteknikan Asia Tenggara 2004~: Bantuan Pemulihan dan Rekonstruksi Aceh 2005~: Pinjaman Kebijakan Pembangunan 2005: Proyek Fakultas Kesehatan & Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta 2007~: Program Pembangunan Daerah Indonesia bagian Timur Laut 2007~: Proyek Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin</p>  <p>Tim Bantuan Darurat terhadap Gempa Samudera Hindia dan Tsunami (Foto: Kenshiro Imamura/JICA)</p>	<p>2008~: Pinjaman Program Penanggulangan Perubahan Iklim 2012: Studi Master Plan Metropolitan Priority Area (MPA) Jakarta untuk Investasi dan Industri 2013: Memulai Pembangunan Kereta Api Cepat (MRT) di Kota Jakarta 2014~: Proyek Penguatan Sistem Jaminan Sosial 2014~: Proyek Peningkatan Kapasitas Keamanan Informasi 2017~: Pembangunan Proyek Pelabuhan Baru di Kawasan Timur Jakarta</p>  <p>Mesin Bor Bawah Tanah (Tunnel Boring Machine) untuk Proyek Kereta Api Cepat Kota Jakarta (MRT)</p>
<p>1991: Runtuhnya Uni Soviet 1997: Krisis Moneter Asia</p>	<p>2000: Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2001: Insiden serangan teroris di Amerika (Insiden Terorisme 9.11) 2005: Mulai berlakunya Protokol Kyoto</p>	<p>2008: Krisis Keuangan 2008 2011: Gempa Bumi Besar di Jepang Bagian Timur 2015: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015: Pembentukan Bank Infrastruktur Asia (AIIB/ Asian Infrastructure Investment Bank) 2015: Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN</p>

Pembangunan Sosial-Ekonomi Indonesia dan Kerjasama Jepang

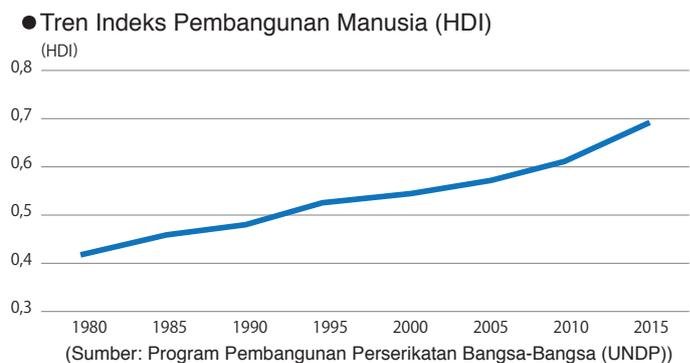
Pembangunan Sosial-Ekonomi Indonesia

Indonesia disebut-sebut sebagai "Keajaiban di Asia Tenggara" dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang (rata-rata per tahun sebesar 7% sejak tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an). Pendapatan nasional bruto per kapita (GNI) pun terus meningkat. Pada tahun 1977 melampaui USD 1.000, kemudian pada tahun 1994 menembus USD 2.000, dan meskipun mengalami kesulitan karena krisis moneter Asia, namun Indonesia akan segera menjadi negara maju tingkat menengah (lebih dari USD 3.956, klasifikasi tahun 2018).

Bila melihat tren tingkat kemiskinan pada periode ini, baik daerah perkotaan maupun pedesaan cenderung menurun secara konsisten. Indeks pembangunan manusia (HDI/ Human Development Index) yang difokuskan pada 3 aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan pun terus meningkat, sehingga terlihat bahwa buah dari pembangunan ekonomi yang berjalan lancar telah didistribusikan secara luas kepada masyarakat.



Jalan Layang Kuningan (2011)



Proyek Pengembangan Kapasitas Daerah Aliran Sungai dalam Pengelolaan dan Teknologi Sumber Daya Air Praktis di Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (Foto: Mika Tanimoto/JICA)

Kerjasama Jepang dan Karakteristiknya

Sejarah kerjasama Jepang dengan Indonesia telah dimulai sejak lama, bahkan sebelum terjalannya hubungan diplomatik, pada tahun 1954, setelah keikutsertaan dalam Colombo Plan, Jepang untuk pertama kalinya menerima 15 orang peserta pelatihan dari Indonesia. Setelah itu, sejak Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pampasan Perang ditandatangani dan diberlakukan pada tahun 1958, Jepang secara konsisten terus memberikan bantuan sesuai tahap perkembangan sosial-ekonomi Indonesia, dan bekerjasama hingga saat ini.

Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara pemberi bantuan terbesar yang menyumbangkan 45% dari nilai kumulatif bantuan pembangunan pemerintah (ODA) kepada Indonesia sejak tahun 1960 (lihat halaman 29 pada buklet ini). Di sisi lain, hingga saat ini melalui ODA, Jepang telah memberikan bantuan kepada 190 negara dan wilayah. Dari negara-negara tersebut, Indonesia merupakan negara penerima bantuan terbesar (1960-2015 sebesar 11,3%). Hal ini memperlihatkan kekuatan hubungan antar kedua negara.

Sekitar 90% dari nilai kumulatif bantuan ODA Jepang (nilai yang disetujui) merupakan Bantuan Dana Pinjaman yang difokuskan dalam Pinjaman Yen untuk mendukung infrastruktur utama seperti pembangkit listrik, irigasi, pengendalian banjir, reklamasi tanah, kereta api, jalan, dan lain-lain. Infrastruktur tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam negara yang luas. Selain itu, seperti saat terjadi krisis moneter Asia (tahun 1997), ketika muncul ketidakjelasan masa depan perekonomian Indonesia, Jepang memberikan bantuan cepat melalui pinjaman non-proyek (bukan proyek individual, tapi pembiayaan untuk memperbaiki neraca pembayaran internasional di negara tersebut, pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan rencana penyesuaian struktural).

Selain kerjasama keuangan, kerjasama teknik telah sangat efektif dalam pengembangan sumber daya manusia, pengenalan sistem dan teknologi baru. Kerjasama semacam itu bisa dikatakan berkontribusi terhadap pengembangan hubungan bilateral berdasarkan hubungan kemanusiaan. Hingga tahun 2016 sebanyak 44.023 orang telah mengikuti pelatihan di Jepang dan Indonesia, 17.459 orang tenaga ahli dan 24.432 orang tim survei telah dikirimkan ke Indonesia.

Dampak dan hasil yang tersebar dari kerjasama pembangunan Jepang, dapat dirangkum sebagai berikut :

● Memperkuat persatuan bangsa

Melalui kontribusi dalam membangun perbaikan infrastruktur dasar di seluruh negeri seperti transportasi, listrik, energi, dan komunikasi, Jepang turut serta dalam menghubungkan antar kepulauan di Indonesia. Disamping itu, Jepang juga berkontribusi dalam penyebaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional melalui pembangunan dan pengembangan stasiun radio dan televisi nasional yang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menambah jumlah penyebaran serta kualitas pendidikan sekolah tingkat menengah melalui program wajib belajar yang baru ke pelosok negeri, Jepang tidak hanya membangun fondasi bagi pembangunan ekonomi saat ini, namun juga berperan dalam meningkatkan persatuan bangsa.

● Landasan untuk pembangunan sosio-ekonomi yang stabil

Selama "Revolusi Hijau" sejak tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, Jepang memberikan bantuan untuk perbaikan infrastruktur pertanian, dan alih teknologi, yang secara langsung memberikan kontribusi dalam peningkatan hasil panen padi yang cukup besar di tingkat nasional serta menghindarkan Indonesia terhadap kekhawatiran krisis pangan. Hal ini juga mendorong keberhasilan di sektor lainnya, seperti halnya perbaikan dalam kesenjangan pendapatan, migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Selain itu, ketika Indonesia mengalami reformasi besar dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Jepang memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pemilu, reformasi kepolisian dan lain-lain, yang berkontribusi terhadap pembentukan sistem demokrasi yang menjadi dasar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang masih terus berlanjut hingga saat ini.



PT. Brantas Abipraya telah mendapatkan alih teknologi dan mendukung pembangunan negara sebagai perusahaan kontraktor dalam Pengembangan Daerah Aliran Sungai Brantas (Foto: PT. Brantas Abipraya)

● Pengembangan bisnis dan sumber daya manusia Indonesia

Karena tidak terbinanya permodalan lokal di Indonesia, Jepang melaksanakan proyek-proyek berskala besar di berbagai sektor, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan milik negara dan pembinaan sumber daya teknis di perusahaan-perusahaan tersebut. Pada Pengembangan Daerah Aliran Sungai Brantas di Jawa Timur yang digabungkan dengan pembangunan terowongan dan bendungan untuk drainase, pembangkit listrik dan lain-lain, selama kurun waktu 40 tahun telah dilakukan pembinaan terhadap 7.000 orang sumber daya manusia. Pada saat bersamaan, melalui proyek studi jangka panjang di Jepang, secara aktif dilakukan juga program pembinaan sumber daya manusia bagi perguruan tinggi, pegawai pemerintah pusat dan daerah, yang setelah kembali ke Indonesia, mereka akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat ikatan antar kedua negara.

● Pengenalan konsep pembangunan inovatif dan lokalisasinya

Melalui Kerjasama Teknis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kesadaran Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan daerah semakin meningkat, sehingga dapat mempromosikan penyusunan rencana pembangunan daerah secara terpadu. Selain itu, untuk mendukung sektor pendidikan dasar, kesehatan dan perawatan medis, berbagai konsep inovatif seperti program bantuan operasional sekolah, *lesson study*, dan buku kesehatan ibu dan anak telah diperkenalkan melalui kerjasama Jepang dan telah ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Indonesia. Saat ini program-program tersebut telah dikembangkan secara mandiri, sehingga bukan hanya sekedar meniru dari kerjasama Jepang.

● Kemitraan melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Para mitra lembaga yang terlibat dalam kerjasama teknis Jepang telah tumbuh dan berkembang khususnya yang bergerak di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya, dan juga telah memiliki pengalaman yang banyak dalam kegiatan KSST dalam membantu negara-negara Asia dan Afrika, di masa mendatang ketika Indonesia menjadi negara pemberi bantuan, keberadaan lembaga tersebut sebagai pusat unggulan diharapkan akan semakin meningkat.

Memperkuat Hubungan Kepercayaan Antar Kedua Negara

Menurut jajak pendapat mengenai Jepang yang diselenggarakan oleh IPSOS Hongkong pada tahun 2014 di 7 negara ASEAN, 95% responden Indonesia menjawab "Telah terjalin hubungan persahabatan di antara kedua negara, dan Jepang merupakan sahabat yang terpercaya." Selain itu, 92% mengatakan bahwa "Kerjasama ekonomi dan teknologi Jepang telah bermanfaat bagi pembangunan negara kami."

Pertukaran sumber daya manusia dan memperdalam rasa saling pengertian yang dikembangkan selama bertahun-tahun merupakan aset yang tak tergantikan bagi kedua negara. Di masa mendatang pun, diharapkan kedua negara akan terus bekerja sama sebagai mitra yang baik, tidak hanya dalam penanganan isu-isu umum seperti pengembangan maritim, mitigasi bencana, jaminan sosial dan urbanisasi, tapi juga dalam penanganan isu-isu di wilayah Asia dan masyarakat global seperti langkah-langkah menghadapi perubahan iklim dan lain-lain.

Transportasi

Gambaran Umum

Sektor transportasi merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur transportasi daerah, ditekankan pada pemerataan hasil pembangunan yang adil, dengan menghubungkan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di daerah perkotaan seperti wilayah metropolitan Jakarta, Jepang memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Indonesia pada saat itu, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang dipimpin oleh sektor swasta dan menghilangkan kesenjangan antara permintaan dengan penyediaan infrastruktur lalu-lintas yang meningkat akibat kenaikan jumlah penduduk dan motorisasi.

Selain itu, setelah arus pembangunan transportasi difokuskan di daerah pusat, kini sudah saatnya untuk memperhatikan ekonomi regional sebagai bagian dari negara ASEAN, di mana negara-negara ASEAN sedang berupaya untuk meningkatkan keterhubungan (konektivitas) di dalam wilayah masing-masing. Harapan terhadap Indonesia sebagai negara yang berperan dalam jaringan produksi dan perdagangan internasional semakin meningkat. Sementara itu, karena logistik Indonesia masih dalam tahap pembangunan, dan biaya distribusi yang tinggi, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta, maka diberikan bantuan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah metropolitan Jakarta yang merupakan pusat industri manufaktur.

Dalam proyek beberapa tahun terakhir, meskipun adanya kebijakan penghematan anggaran, bantuan Jepang terus berlanjut dengan difokuskan pada kerjasama teknis di bidang jalan raya, penerbangan, pelabuhan, maritim (termasuk persiapan untuk membentuk proyek baru Pinjaman Yen). Secara teknis, kapasitas Pemerintah Indonesia dan perusahaan di Indonesia semakin meningkat, namun pada proyek-proyek yang membutuhkan teknologi baru seperti pembangunan kereta bawah tanah dibutuhkan kerjasama yang terus berlanjut, termasuk alih teknologi dari Jepang, yang mana kerjasama tersebut menjadi nilai tambah bagi ODA Jepang.

Hasil

- Sejak dulu, Jepang telah berperan sebagai pelopor infrastruktur transportasi berskala besar dengan inovasi yang tinggi, mulai dari pembangunan jalan tol di dalam kota Jakarta, kereta rel listrik, jalan layang, jalur kereta api ganda, sampai pembangunan kereta bawah tanah (MRT), dan lain-lain.

- Dengan memperkuat jaringan di seluruh Indonesia, Jepang berkontribusi dalam memperkuat keterhubungan (konektivitas) di dalam negeri, mengembangkan industri Indonesia sebagai bagian dari jejaring produksi dan perdagangan internasional.

<Contoh penguatan jaringan dari kerjasama Jepang>

- ▶ Penguatan transportasi feri dan jalan lintas Sumatera (yang 60% dari jalan sepanjang 2.500 km di bangun oleh Jepang). Melalui pembangunan transportasi feri yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dapat mempersingkat waktu yang tadinya 5 jam sekali jalan, menjadi kurang dari 2 jam.

- ▶ Memperkuat kapasitas transportasi kereta api utama di Pulau Jawa.

- ▶ Pembangunan dan perluasan 5 bandara (Bali, Balikpapan, Surabaya, Padang, Palembang), serta pembangunan fasilitas keamanan di 33 bandara.

- ▶ Pembangunan 8 dari 28 pelabuhan pintu gerbang nasional, 12 pelabuhan non-komersial di Indonesia bagian timur, serta 10 pelabuhan feri di seluruh Indonesia.

- Berdasarkan rencana lalu-lintas terpadu (master plan) antara wilayah dan moda transportasi untuk mengurangi masalah lalu-lintas akibat kepadatan di wilayah metropolitan Jakarta, telah dilakukan pembangunan infrastruktur di wilayah metropolitan yang juga merupakan basis kegiatan penting bagi perusahaan Jepang, melalui pelaksanaan proyek jalan tol dan lain-lain untuk mengurangi kemacetan dan mengendalikan lalu-lintas umum di kota, dimulai dengan pembangunan MRT.

- Berkontribusi dalam pengembangan sumber daya lokal, antara lain dengan memberikan nilai tambah di berbagai bidang transportasi melalui pembangunan sekolah kejuruan kemaritiman (total 6 sekolah), peningkatan keselamatan dan kebijakan dalam bidang keselamatan, peningkatan mutu layanan transportasi dan infrastruktur, kerjasama teknis, alih teknologi dan lain-lain. Khususnya di sektor jalan raya, contoh ekspansi perusahaan Indonesia ke luar negeri dan Kerjasama Selatan-Selatan juga telah dimulai.

Proyek Jalan Layang Simpang Semanggi (Foto: Kenshiro Imamura/JICA)



Proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi di Kota Jakarta (MRT) (2006-Sekarang)



1: Pengerjaan konstruksi di dekat stasiun Bundaran HI



2: Kerjasama antar teknisi kedua negara



3: Mesin penggalian shield

1,2,3: (Foto: PT. MRTJ)

Dengan dibangunnya jalur kereta api berkecepatan tinggi (sekitar 15,7 km) di mana termasuk juga pembangunan kereta bawah tanah pertama di Indonesia, proyek yang dilaksanakan dengan pinjaman ODA ini berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan investasi Indonesia, termasuk untuk efisiensi distribusi logistik dan pengurangan polusi udara akibat berkurangnya kemacetan lalu-lintas di wilayah ibukota. Saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan konstruksi yang dimulai pembangunannya pada bulan Oktober 2013 dan rencananya akan selesai dan diresmikan pada bulan Maret 2019. Pemenuhan layanan transportasi di dalam kota merupakan hal yang sangat diperlukan bagi keseluruhan transportasi di wilayah ibukota Jakarta, oleh karena itu melalui hasil sinergi dari "Proyek Modernisasi Kereta Api Jabotabek" yang merupakan pinjaman ODA Jepang, akan mengalihkan tren kalangan berpenghasilan

menengah ke atas untuk menggunakan transportasi kereta api, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan, seiring dengan berkurangnya kemacetan di jalan raya akibat adanya peralihan dari penggunaan mobil pribadi untuk mobilitas di pusat kota.

Selain itu, beberapa terobosan inovasi baru yang diperkenalkan pada proyek ini, yaitu adanya alih teknologi baru kepada mitra Indonesia dalam hal metode shield di bagian terowongan, metode konstruksi dinding bawah tanah, metode keseimbangan kantilever di bagian rel layang di atas tanah. Kemudian, saat ini juga sedang dilaksanakan detail *design study* lanjutan perluasan MRT (Jalur Utara-Selatan) dan proyek MRT jalur Timur-Barat (E/S) (Tahap I) melalui pinjaman ODA Jepang.



Simpang Semanggi



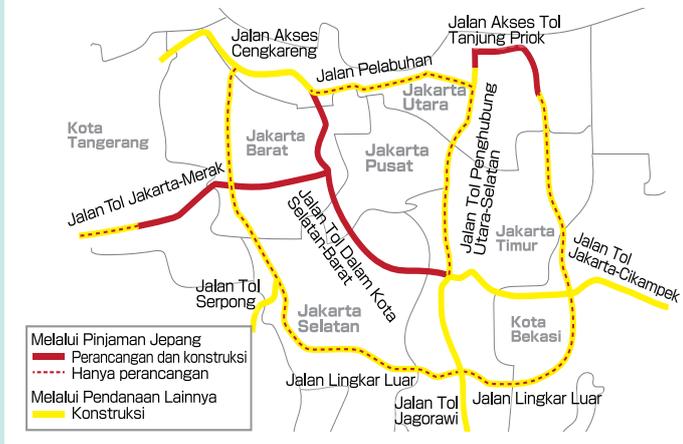
Terminal Kapal Fery Merak

↓ Seorang petugas lapangan sedang berbicara dengan tenaga ahli Jepang di Depo Depok yang dibangun dengan Pinjaman ODA (Foto: Shinichi Kuno/JICA)



Transportasi (lanjutan)

Pembangunan Jaringan Transportasi di Wilayah Metropolitan Jakarta (1978 - Sekarang)



Jalan tol bantuan Jepang di wilayah Metropolitan Jakarta

Rencana pengembangan wilayah metropolitan Jakarta (JMDP: Jabotabek Metropolitan Development Plan) awalnya telah dibuat pada tahun 1980 atas kerjasama dengan Bank Dunia. Isinya adalah mengenai pelaksanaan pengembangan wilayah metropolitan dengan struktur multipolar, dan juga keinginan untuk memajukan urbanisasi yang saat itu hanya terlihat ke arah selatan saja, untuk dikembangkan juga ke arah timur-barat. Master plan sektor jalan dalam "Studi Pengembangan Sistem Jalan Arteri (Arterial Road System Development Study(ARSDDS))" (tahun 1987) yang dilaksanakan oleh JICA, pada umumnya mengikuti konsep ini. Misalnya, di jalan lingkaran luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), merupakan salah satu jalan utama yang telah dilakukan studi kelayakannya oleh JICA, memiliki peran sebagai pembatas untuk menghalangi perkembangan lebih jauh ke arah selatan. Di jalan tol Jagorawi (dibuka pada tahun 1978) yang menghubungkan Jakarta dan Bogor pun, arah selatan dari JORR dibatasi oleh sejumlah simpang susun. Sebagai alternatif perkembangan ke bagian selatan, Serpong dibangun sebagai kota mandiri, dan tekanan pembangunan ke arah selatan disebarkan ke arah Tangerang (barat) dan Bekasi (timur). Dalam hal ini, jalan tol Jakarta - Merak (Jakarta - Tangerang dibuka pada tahun 1984) yang dibangun dengan Pinjaman ODA Jepang, jalan tol Cikampek (dibuka pada tahun 1988) yang dibangun dengan bantuan Bank Dunia dan pendanaan Kuwait telah berperan untuk mendorong pembangunan ke arah timur-barat.

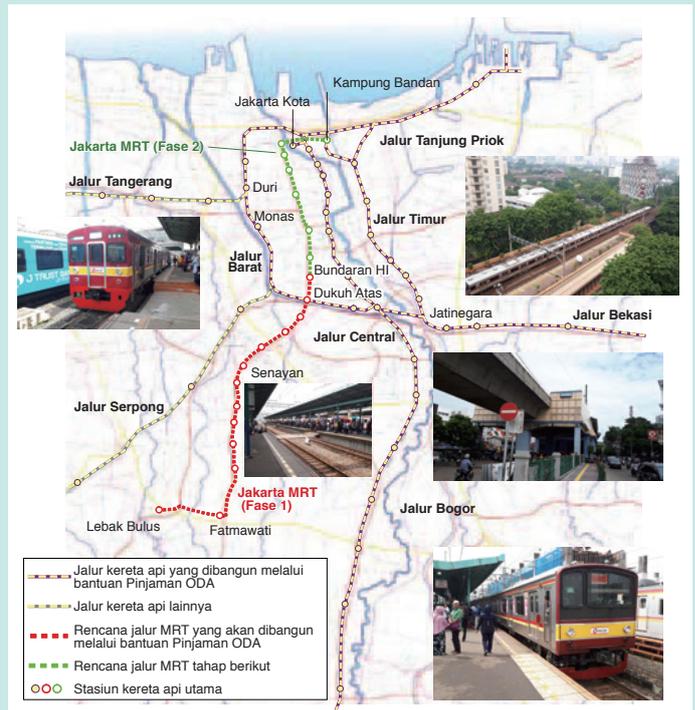
Selain itu, pada awal tahun 1980-an di wilayah metropolitan Jakarta belum ada jalan tol yang menghubungkan dalam kota. Tol lingkaran dalam kota yang menghubungkan jalan tol radial, telah dirancang sejak tahun 1978 dengan bantuan Jepang. Salah satu diantaranya, yaitu jalan tol dalam kota Selatan-Barat (Cawang-Pluit) sebagai jalan layang utama, yang konstruksinya juga dibangun dengan Pinjaman ODA. Jalan tol Cawang-Grogol selesai dibangun pada tahun 1989, sedangkan jalan tol Grogol-Pluit selesai dibangun pada tahun 1996. Dari total perpanjangan jalan tol di wilayah metropolitan Jakarta sepanjang 274 km, 60% di antaranya dibangun dengan bantuan Jepang (98 km di antaranya hanya merancang saja).

Jalan Tol Dalam Kota Selatan-Barat (Cawang-Pluit)



Jalan Layang Pancoran (2011)

Jalan Layang Semanggi (2011)



Peningkatan Kereta Api di JABODETABEK Melalui Pinjaman ODA

Di sisi lain, di bidang perkeretaapian, "Proyek Modernisasi Kereta Api Jabotabek" (tahun 1982-2001) diposisikan sebagai proyek nasional sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden. Proyek ini dimulai dengan tujuan untuk membangun sistem perkeretaapian yang dapat berfungsi secara memadai untuk mendukung aktivitas komuter di wilayah metropolitan Jakarta. Dengan dimulainya Pinjaman ODA, beberapa di antara proyek utamanya adalah pengadaan kereta api, perbaikan jalur kereta api, pemasangan sarana komunikasi, elektrifikasi, pembangunan depo dan tempat perbaikan kereta api (bengkel), perbaikan stasiun kereta api, penggunaan sinyal otomatis, jalur kereta api ganda, elevasi jalur tengah (ditinggikan) telah dibiayai melalui Pinjaman ODA selama 20 tahun. Hal ini merupakan pelaksanaan dari rekomendasi yang diusulkan pada laporan Master Plan yang dirumuskan dalam "Studi Rencana Transportasi Kereta Api di Wilayah Metropolitan Jakarta" (tahun 1979-1981).

Sampai tahun 2000, rencana transportasi di wilayah metropolitan dirumuskan secara terpisah antara sistem perkeretaapian dan sistem jalan raya. Namun demikian perlu pertimbangan seksama untuk mengatasi masalah kemacetan sebagai kriteria penilaian penting di dalam pemilihan proyek pembangunan. Untuk itu pemikiran tentang pendekatan transportasi kota yang terpadu mulai diperkenalkan dengan menggabungkan sistem perkeretaapian dan sistem jalan raya melalui pelaksanaan "Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek (The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek/ SITRAMP) Tahap 2" (tahun 2001-2004). Mengenalkan penggunaan transportasi umum, sekaligus perencanaan kebijakan transportasi secara terpadu antara wilayah dengan moda transportasi untuk mengurangi penumpukan di Jakarta. Bantuan pembangunan transportasi yang telah dilakukan oleh SITRAMP tidak hanya mencakup perencanaan terpadu tetapi juga memiliki *database* dengan skala besar untuk membangun transportasi umum perkotaan (melalui MRT), pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan dengan membuat jalan layang serta pengenalan kebijakan dan sistem terkait (pengendalian permintaan lalu-lintas dan lain sebagainya). Selain itu, juga dilaksanakan proyek kerjasama teknis lanjutan, yaitu "Proyek Integrasi Kebijakan Transportasi Perkotaan JABODETABEK (JABODETABEK Urban Transportation Policy Integration Project/JUTPI)," saat ini dan juga sedang dilakukan pembaruan Master Plan transportasi perkotaan SITRAMP.

Proyek Pengembangan Bandar Udara Baru di Padang (1996 - 2005)



Bangunan Terminal Penumpang
(Foto: Lukman F. Laisa)

Bandara Padang yang lama (Bandara Tabing) digunakan bersama-sama dengan Angkutan Udara, dengan kapasitas penumpang sekitar 400.000 orang per tahun dan landasan pacu yang pendek yaitu sekitar 2.200 meter. Dengan dilatarbelakangi oleh jumlah penumpang yang diperkirakan akan melebihi kapasitas bandara dalam waktu dekat, posisi yang sulit untuk memperluas landasan pacu dan bangunan terminal yang berada di dekat kota Padang, bagian selatan bandara yang merupakan daerah perbukitan sehingga menghalangi keberangkatan dan kedatangan pesawat, serta tidak tersedianya instrumen sistem pendaratan (ILS: Instrumental Landing System), maka proyek bandara baru Padang (Bandara Internasional Minangkabau) dengan luas terminal penumpang sekitar 12 kali lipat dari bandara lama (12.750 m²), apron seluas 4-5 kali lipat dari bandara lama, dan memiliki fasilitas kargo yang dapat menangani 10.000 ton per tahun, telah dibangun dengan pinjaman ODA setelah dilakukan studi kelayakan pembangunan melalui engineering services (E/S) sampai konstruksi.



Jalan akses ke bandara

Karena ini merupakan bandara baru, maka membutuhkan waktu untuk mendapatkan lahan, dan dengan adanya dampak krisis moneter Asia, pembangunannya baru dimulai pada tahun 2002 dan dibuka pada tahun 2005. Pada tahap studi pendahuluan, bandara ini dirancang untuk menampung 700.000 orang penumpang per tahun, namun rencana tersebut ditinjau kembali dan dikembangkan menjadi bandara yang dapat menampung penumpang dengan jumlah maksimum 1.700.000 orang per tahun. Pada tahun 2006, jumlah penumpang pengguna bandara setiap tahun melebihi 1.500.000 juta orang, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah juga mencapai 14%. Oleh sebab itu, segera direncanakan perluasan terminal penumpang dan perluasan landasan (dari 2.750 m menjadi 3.000 m). Selain itu, seiring dengan perkembangan bandara baru, juga dibangun jalan akses dari jalan raya nasional, dan saat ini telah dibangun 4 ruas jalan di seluruh bagian termasuk jalan nasional sampai ke Kota Padang.

Akibat gempa bumi besar yang melanda kota Padang pada tahun 2009, banyak bangunan yang roboh, jalan retak dan kerusakan serius lainnya di kota Padang dan sekitarnya, namun bandara baru Padang hanya mengalami sedikit retak di bagian gedung, sehingga bandara tidak perlu segera ditutup sesaat setelah terjadinya gempa, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap transportasi untuk pendistribusian bantuan dan kegiatan penyelamatan dari Pemerintah Indonesia maupun berbagai negara.



Penampakan bandara di Padang dan akses jalan bandara (Foto: Lukman F. Laisa)

Pembangunan Sistem Pelayanan Lalu-lintas Kapal (VTS) di Selat Malaka-Singapura (2008 - Sekarang)



Ruang Operator VTS
(Foto: Japan Radio Company)



Sistem Radar
(Foto: Japan Radio Company)

Banyak kapal yang tenggelam di perairan sempit, dangkal dan banyak terumbu karang. Kapal-kapal besar seperti kapal tanker dan kapal kontainer padat berlayar, sehingga Selat Malaka-Singapura merupakan wilayah sibuk yang selalu berada dalam bahaya karena sering terjadi kecelakaan laut dan bajak laut. Karena itu, untuk meningkatkan keamanan kapal yang berlayar, sejak tahun 2008 telah dilakukan kerjasama melalui bantuan hibah untuk pembangunan sistem pelayanan lalu-lintas kapal (VTS: Vessel Traffic Service) yang bertujuan untuk memantau navigasi kapal di laut dan pelabuhan, kemudian sejak tahun 2012 juga telah dilakukan proyek kerjasama teknis yang bertujuan untuk melatih para operator guna memperkuat operasional VTS.

Dilatarbelakangi oleh meningkatnya volume lalu-lintas kapal dan kecelakaan kapal di perairan Indonesia, sejak tahun 1980-an Jepang telah membantu pembangunan stasiun pesisir untuk keselamatan kapal yang mencakup seluruh wilayah laut di Indonesia (stasiun komunikasi di bagian darat komunikasi kapal). Selanjutnya, untuk memantau laut dan pelabuhan di Selat Malaka-Singapura di mana terdapat banyak volume lalu-lintas kapal terutama di perairan Indonesia, dilakukan pembangunan VTS yang merupakan sistem terpadu yang terdiri dari sistem radar dengan fungsi GPS, sistem pelacakan radar dan sistem lainnya yang berkontribusi terhadap keamanan dan keselamatan secara menyeluruh dari semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia.

Jepang membantu Indonesia untuk berperan dalam menjaga keselamatan navigasi kapal di perairan Selat Malaka-Singapura, bersama dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu kesamaan antara Jepang dan Indonesia adalah keduanya merupakan negara maritim dan sangat penting bagi kedua negara untuk bekerjasama dalam bidang ini.



Pusat VTS (Batu Ampar)
(Foto: Japan Radio Company)



Radar VTS (Tanjung Medang)
(Foto: Japan Radio Company)

Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Makro Ekonomi

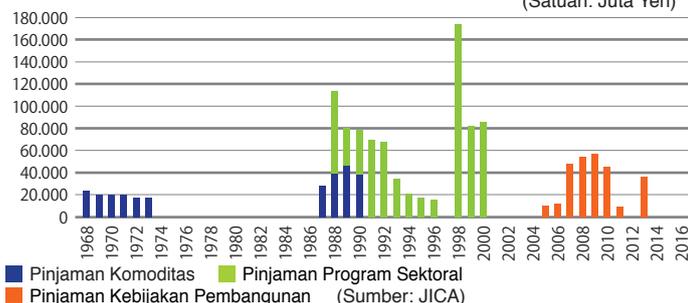
Gambaran Umum

Di sektor kebijakan ekonomi dan manajemen makro ekonomi, Jepang telah berkontribusi terhadap stabilisasi ekonomi dan koordinasi struktural di Indonesia, melalui kerjasama keuangan dan kerjasama teknis sejak tahun 1960-an hingga sekarang.

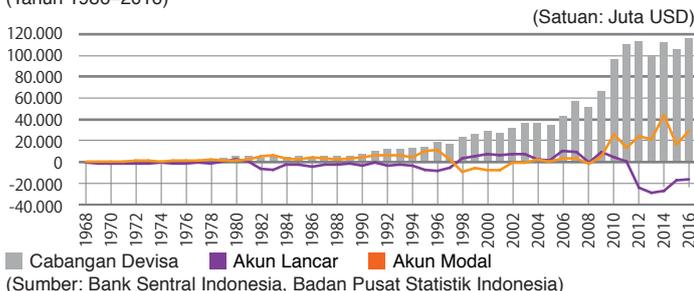
Contoh yang mewakili kerjasama keuangan adalah pengaturan neraca pembayaran internasional serta koordinasi struktural pada saat krisis neraca pembayaran pada tahun 1960-an-1970-an, *reverse oil shock* pada paruh kedua tahun 1980-an, dan pada saat krisis moneter Asia sejak tahun 1997. Sejak tahun 2000-an, program pinjaman untuk membiayai anggaran belanja yang defisit dilaksanakan untuk mereformasi kebijakan dalam area seperti perbaikan iklim investasi, pengelolaan operasional keuangan, pengurangan kemiskinan, penanganan perubahan iklim, dan perbaikan sistem di bidang reformasi infrastruktur (lihat Gambar 1).

Pada kerjasama teknis, dimulai dengan pengiriman penasihat kebijakan ke BAPPENAS pada paruh kedua tahun 1960-an, dilaksanakan bantuan kebijakan ekonomi pada saat krisis moneter Asia pada tahun 1997, dan forum kebijakan yang diadakan setiap tonggak perubahan rezim sejak tahun 1999. Sejak tahun 2000-an, kerjasama teknis telah dilaksanakan di bidang birokrasi perpajakan, pengelolaan hutang luar negeri, kebijakan moneter, investasi dalam bidang infrastruktur melalui kemitraan pemerintah-swasta, anggaran kinerja, pengelolaan perbendaharaan negara dan aset milik negara, dan jaminan sosial. Saat ini sedang dikembangkan bantuan terhadap sistem dan pengembangan kapasitas untuk menciptakan kemampuan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi menjadi negara berkembang dengan pendapatan menengah ke depannya.

● Gambar 1: Tren Program Pemberian Pinjaman Jenis Non-proyek dari Jepang (Tahun 1968–2016) (Satuan: Juta Yen)



● Gambar 2 : Tren Neraca Pembayaran Internasional & Cadangan Devisa Indonesia (Tahun 1986–2016) (Satuan: Juta USD)



New Miyazawa Initiative: Bantuan terhadap Krisis Moneter Asia (1998)

Berdasarkan "New Miyazawa Initiative," selain pinjaman program sektoral, Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia yang dilanda krisis moneter pada tahun 1997, berupa pinjaman untuk pembangunan sektor kesehatan dan gizi serta pinjaman untuk jaringan pengaman sosial khususnya bagi kelompok miskin yang rentan terhadap dampak krisis. Selain itu, bantuan kebijakan ekonomi untuk menangani krisis moneter dilaksanakan melalui dialog kebijakan antara intelektual Jepang dengan pembuat kebijakan Indonesia. Melalui kerjasama finansial dan kerjasama teknis ini, Jepang memberikan kontribusi besar dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia.

Hasil

- Berkontribusi dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kerjasama keuangan untuk membantu pengaturan neraca pembayaran internasional dan koordinasi struktural pada saat krisis neraca pembayaran internasional, reverse oil shock dan krisis moneter di Asia (lihat Gambar 2).

- ▶ Selama krisis neraca pembayaran, Jepang memberikan bantuan sebesar total 116,8 miliar yen (USD 0,35 miliar*/ tahun 1968-1973), sehingga berkontribusi terhadap perbaikan defisit neraca pembayaran internasional (setara dengan sekitar 12,6% dari total defisit transaksi berjalan pada periode yang sama).

- ▶ Memberikan bantuan sebesar total 513,8 miliar yen (USD 4,0 miliar*/ tahun 1987-1996) pada saat harga minyak menurun tajam (reverse oil shock) di tahun 1986 setelah oil crisis, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan defisit neraca pembayaran internasional dan koordinasi struktural (setara dengan sekitar 12,8% dari total defisit transaksi berjalan pada periode yang sama).

- ▶ Memberikan bantuan sebesar total 333,9 miliar yen (USD 2,8 miliar*/ tahun 1998-2000) pada saat krisis moneter Asia, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan defisit neraca pembayaran internasional dan pengurangan dampak krisis ekonomi bagi kelompok miskin yang rentan terhadap dampak krisis (setara dengan sekitar 55,6% dari defisit transaksi berjalan pada tahun 1997).

- Melalui bantuan terhadap defisit keuangan dan dialog kebijakan, Jepang telah berkontribusi terhadap reformasi sistem dan kebijakan dalam stabilisasi makro ekonomi, perbaikan iklim investasi, pengelolaan operasional keuangan, pengurangan kemiskinan, penanganan perubahan iklim dan reformasi infrastruktur

- ▶ Memberikan bantuan keuangan sebesar 266,3 miliar yen (USD 2,7 miliar*/ tahun 2005-2013), sehingga berkontribusi terhadap perbaikan defisit keuangan (setara dengan sekitar 4,5% dari total defisit keuangan pada periode yang sama).

- ▶ Melalui dialog kebijakan di bidang perbaikan iklim investasi, dimulai dengan revisi daftar negatif investasi yang diusulkan oleh Jepang berdasarkan pendapat dari sektor swasta, melalui berbagai aksi kebijakan seperti layanan satu atap untuk investasi, peningkatan sistem perpajakan harga transfer dan lain sebagainya.

- ▶ Peringkat di lingkungan bisnis Bank Dunia telah meningkat secara signifikan dari posisi ke-131 pada tahun 2006 (dari 175 negara) ke posisi 72 pada tahun 2017 (dari 190 negara). Selain itu, nilai investasi langsung asing juga meningkat dari USD 195 miliar pada tahun 2011 menjadi USD 289 miliar pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, saham investasi Jepang meningkat dari 7,7% menjadi 18,7%.

- Berkontribusi terhadap pembentukan sistem manajemen ekonomi dan peningkatan pengembangan kapasitas, melalui kerjasama teknis yang dimulai dari perumusan rencana pembangunan nasional, bantuan kebijakan ekonomi terhadap krisis moneter, birokrasi perpajakan, investasi dalam bidang infrastruktur melalui kemitraan pemerintah dan swasta, dan lain-lain. Selain itu, melalui pengembangan kapasitas, kerjasama teknik tersebut dianggap telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil dari bantuan untuk neraca pembayaran internasional dan bantuan keuangan sebagaimana tersebut di atas.

- ▶ Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, Jepang telah mendukung pembentukan kerangka perundang-undangan, antara lain peraturan penting tentang kerjasama antara pemerintah dengan swasta (Peraturan Presiden RI No. 38/2015, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4/2015, Peraturan Kepala LKPP No. 19/2015 dan lain-lain) maupun berbagai peraturan tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan (Peraturan Menteri Keuangan No. 190/2015, revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2016, Permendagri No. 96/2016 dan lain-lain).

*Nilai tukar rata-rata tahunan untuk periode program

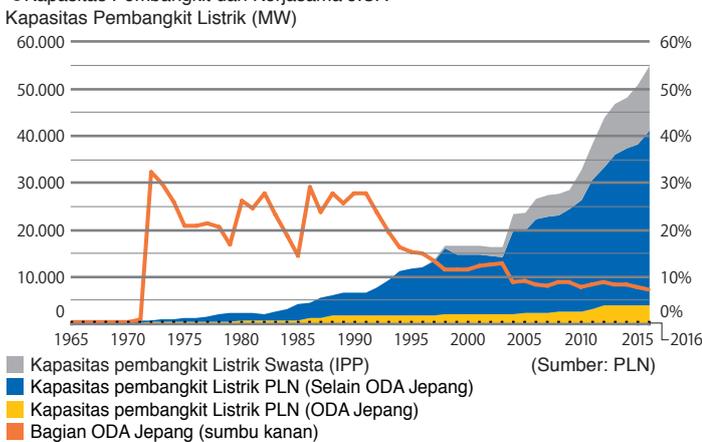
Listrik dan Energi

Gambaran Umum

Di sektor listrik dan energi, sejak Pengembangan Daerah Aliran Sungai Brantas pada awal tahun 1960-an, Jepang telah memberikan bantuan untuk pengembangan pembangunan listrik Indonesia melebihi donatur yang lain, dan telah memberikan bantuan sebesar 7,2% dari total pasokan listrik di Indonesia (20% bila ditambahkan IPP (*Independent Power Producer*) dari perusahaan Jepang)(per tahun 2016).

Pada tahun 1970-an, Jepang membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang menjadi *base load* terutama di Jawa bagian timur, serta pengembangan jaringan listrik. Pada tahun 1980-an, Jepang memperluas bantuannya untuk terus mendukung pengembangan sumber daya listrik utama di Pulau Jawa dan *main power plants* di luar Pulau Jawa. Memasuki tahun 1990-an, bekerja sama dengan Bank Dunia dan donatur lainnya, Jepang membantu stabilisasi listrik dan pembangunan jaringan transmisi utama di Pulau Jawa. Dukungan pada jaringan sumber daya listrik merupakan salah satu bidang penting untuk mendukung IPP Indonesia dengan memberikan daya yang dihasilkan masuk ke dalam sistem. Pada awal tahun 2000-an, untuk membantu sektor energi yang terpuruk akibat ketidakcukupan dana untuk membangun dan menyediakan listrik karena ekonomi Indonesia yang sedang dalam pemulihan dari krisis moneter Asia, Jepang menanggapi permintaan Pemerintah Indonesia dengan memberikan bantuan darurat untuk membantu krisis dengan membuat *power plants* agar terhindar dari krisis energi yang dapat menghalangi pemulihan ekonomi Indonesia. Dari akhir tahun 2000-an, untuk mencapai tujuan kebijakan yang berdasarkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan antisipasi perubahan iklim di Indonesia, Jepang telah memberikan bantuan yang lebih komprehensif di bidang teknologi panas bumi, pembangkit listrik bertenaga air kecil dan teknologi batubara bersih, termasuk pengembangan sumber daya manusia.

●Kapasitas Pembangkit dan Kerjasama JICA



1: Suasana Aktivitas Eksplorasi Panas Bumi (Foto: Geological Agency)
 2: Jalur Transmisi Jawa - Bali: Depok-Tasikmalaya 500kv (Foto: PT. Perusahaan Listrik Negara)

Hasil

- Membangun 10.963 megawatt fasilitas pembangkit listrik sebagai pengembangan sumber listrik utama (20% dari total kapasitas listrik yang dihasilkan di Indonesia), sehingga melalui bantuan pembangunan jaringan transmisi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia.
- Memberikan kontribusi besar dalam mengurangi mati listrik di wilayah metropolitan Jakarta, melalui pembangunan 3 pembangkit listrik tenaga gas di wilayah metropolitan Jakarta.
 (Referensi)
 Pada tahun 2012, ketika pembangkit listrik tenaga gas baru yang didanai oleh JICA memulai operasinya, jumlah hari pemadaman listrik (perkiraan) turun menjadi 2 hari (per 29 Oktober 2012), dibandingkan dengan 32 hari di tahun 2006.
- Jepang memberikan kontribusi dalam memajukan pengembangan panas bumi dan mitigasi gas karbon dioksida di Indonesia melalui beberapa proyek kerjasama teknis dengan membantu meningkatkan akurasi data survei permukaan untuk pengembangan panas bumi dan dengan mengirimkan konsultan berpengalaman ke lebih dari lima proyek pinjaman ODA pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- Melalui penyusunan master plan berbagai rencana pengembangan tenaga listrik, Jepang membantu perencanaan sumber listrik yang optimal untuk negara yang luas, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah (rasio elektrifikasi di daerah sebesar 92,85% (pada pertengahan pertama tahun 2017)).

Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Utama di Jawa & Bali (1995 – 2005)

Pada tahun 1995, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, di dalam sistem pasokan listrik di Jawa dan Bali terdapat ketidakseimbangan geografis yang signifikan antara permintaan dengan pasokan di wilayah timur dan barat. Dari perkiraan kebutuhan listrik di masa yang akan datang dan rencana pembangunan pembangkit listrik, ketidakseimbangan geografis diperkirakan akan semakin meluas, sehingga perlu dibangun jaringan transmisi untuk pengadaan pembangkit listrik yang baru.

Dengan latar belakang seperti ini, Jepang, Bank Dunia dan mitra donor lainnya menetapkan untuk membantu pembangunan sistem jaringan listrik di Indonesia, yang dibagi atas beberapa bagian. Di dalam proyek pembangunan 500kV jalur transmisi yang menghubungkan stasiun pembangkit listrik Paiton yang berada di area sumber listrik di pantai timur Pulau Jawa dengan Jakarta yang merupakan area konsumsi listrik utama, Jepang membantu pembangunan saluran transmisi dan gardu induk terkait dari Gardu Induk Klaten Baru yang berada di dekat kota Yogyakarta sampai Gardu Induk Depok III yang berada di dekat kota Jakarta, sehingga pembangunan tersebut berkontribusi terhadap pasokan listrik yang stabil dan efisien, serta memperbaiki ketidakseimbangan geografis antara permintaan dan pasokan listrik, sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan listrik di Pulau Jawa.

●Garis besar sistem dan area yang menjadi target proyek saluran transmisi di Jawa & Bali (Dokumen JICA)



Pengembangan Sektor Swasta

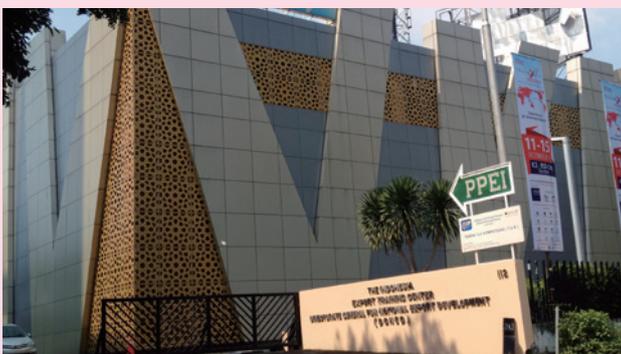
Gambaran Umum

Pada pengembangan sektor swasta, mulai tahun 1960-an hingga tahun 1980-an, Jepang telah membantu perbaikan dan perluasan pabrik milik negara yang sudah ada (pabrik pembuatan kertas, pemintalan, tekstil, pembuatan kapal, pupuk), serta survei dan perencanaan yang terkait dengan pembangunan industri baru seperti besi dan baja, bahan kimia. Mayoritas proyek bantuan banyak dilaksanakan di wilayah Jawa dan Sumatera, namun pada paruh kedua tahun 1970-an, Jepang membantu pengembangan kawasan industri di wilayah Sulawesi dan pembentukan fondasi bagi pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.

Hingga masa krisis moneter Asia pada akhir tahun 1990-an, di bawah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan modal asing secara aktif, Jepang fokus pada pelatihan kerja dan pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia industri, bekerja sama dalam menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, serta mendidik instruktur pelatihan dan petugas penyuluh industri. Selain itu, ketika pelatihan industri berorientasi ekspor menjadi kebutuhan yang mendesak karena Indonesia ingin melepaskan diri dari struktur ekonomi yang bergantung kepada minyak mentah, Jepang membantu dalam pembangunan sistem pelatihan perdagangan. Pada saat bersamaan, juga diberikan bantuan dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan pembentukan sistem pendorong investasi, melalui pembangunan kawasan industri berskala besar di sekitar Jakarta oleh perusahaan Jepang.

Setelah memasuki tahun 2000-an, dan beralih ke masa reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi, kerjasama teknis yang terkait dengan bantuan pembinaan industri pendukung dan usaha kecil menengah (UKM) menjadi fokus utama dalam penguatan sektor swasta. Selanjutnya, setelah bergabung dengan negara berpenghasilan menengah, pada sekitar tahun 2010, dalam situasi di mana globalisasi kegiatan ekonomi dan konsumsi masyarakat semakin berkembang, sistem perlindungan bagi konsumen dan pelaku industri harus diperkuat. Karena itu, selain bantuan pembangunan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang telah dilaksanakan sejak tahun 1990-an, juga diberikan bantuan pembangunan sistem yang terkait dengan perlindungan konsumen. Sementara itu, studi penelitian dan perencanaan penguatan rantai nilai untuk tiga bidang strategis, yaitu otomotif, listrik dan elektronika, dan pengolahan makanan, didukung secara teknis dalam rangka meningkatkan daya saing internasional di bidang industri manufaktur.

Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Pusat Promosi dan Pelatihan Ekspor Daerah (PPPED)(1987 - 2006)



Tampilan PPEI



Pusat Pengembangan Desain di PPEI

Hasil

- Melalui sekitar 20 survei dan perencanaan serta kerjasama keuangan lebih dari 130 miliar yen, industri manufaktur dipromosikan dan basis pengembangan industri dikembangkan. Hingga tahun 1960-an industri pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai setengah dari ekonomi nasional (GDP), sedangkan rasio industri manufaktur kurang dari 10%, namun pada tahun 1985 tumbuh menjadi 16%.
- Di Sulawesi telah dikembangkan kawasan industri seluas 200 hektar (contohnya di Kawasan Industri Ujung Pandang yang terdapat 220 perusahaan per Juli 2017, tingkat hunian sekitar 90%, banyak industri pendistribusian dan industri pengolahan pertanian), dan telah terbentuk poros baru kegiatan ekonomi yang sebelumnya cenderung dilakukan di wilayah Jawa dan Sumatera, telah meluas ke wilayah Indonesia bagian timur.
- Melalui kerjasama keuangan dan kerjasama teknis, fungsi utama untuk pelatihan vokasional kerja dan pengembangan sumber daya manusia industri telah dikembangkan dan digunakan sampai saat ini. Sebagai contoh, berdirinya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN CEVEST) untuk pelatihan instruktur dan pembinaan industri kecil, yang dalam setahun menerima sekitar 4.000 orang peserta pelatihan. Selain itu adanya Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia di Jakarta (PPEI) serta Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (PPPED).
- Melalui pengiriman tenaga ahli dan dialog tentang kemitraan pemerintah dan swasta, telah terbentuk sistem investasi dan bisnis yang mendukung masuknya perusahaan Jepang. Dengan revisi daftar negatif investasi, pengenalan layanan satu atap/*one stop service*, peningkatan sistem perpajakan harga transfer dan lain-lain, posisi Indonesia di peringkat lingkungan bisnis Bank Dunia menjadi meningkat (tahun 2006 peringkat ke 131 sedangkan tahun 2017 di peringkat ke 72).
- Pemerintah nasional/daerah dan lembaga pendukung (kelompok perdagangan dan industri, institusi pendidikan tingkat tinggi, LSM dan lain-lain) bekerja sama membangun model kegiatan untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk oleh pelaku industri daerah (Industri Kecil dan Menengah). Perbaikan produk dan uji pasar terus dilakukan secara berulang-ulang, selain itu kegiatan yang mendorong pencocokan bisnis antara pembeli dan investor terus disebarluaskan dan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Model ini telah disebarluaskan ke penjuru negeri dengan inisiatif dari Kementerian Perindustrian.

PPEI didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan uji produk serta pendidikan dan pelatihan bagi para eksportir, dengan melaksanakan 4 jenis program pendidikan dan pelatihan, yaitu pelatihan perdagangan (jumlah peserta pelatihan pada tahun 2017 sebanyak 3.500 orang), pembinaan usaha kecil dan menengah, pengembangan pelatihan dan kerjasama promosi dan pemasaran. Area yang sebelumnya merupakan ruang pengujian produk telah mengalami perubahan kebutuhan setelah itu, dan kini dimanfaatkan sebagai Pusat Pengembangan Desain.

Program-program di PPEI, sejak awal tahun 2000-an telah dikembangkan ke tingkat PPPED di kota-kota besar selain wilayah Jawa seperti Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan memberi peluang untuk memperkuat kapasitas usaha kecil menengah di berbagai daerah. Mekanisme ini terus berlanjut, bahkan setelah Jepang mengakhiri kerjasamanya pun, atas keinginan dan permintaan dari pemerintah daerah (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dengan berbekal pengetahuan dan *know-how* yang dikumpulkan di PPEI, serta berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari pendirian PPPED di berbagai daerah, Kementerian Perdagangan telah merealisasikan pendirian pusat pelatihan di daerah-daerah yang baru.

Telekomunikasi

Gambaran Umum

Kerjasama di sektor telekomunikasi telah dilaksanakan di bidang komunikasi dan penyiaran.

Di bidang komunikasi, Jepang menjadi pionir mitra pembangunan untuk bantuan pengadaan infrastruktur komunikasi antar pulau dengan adanya proyek pengembangan jaringan komunikasi pada tahun 1969. Pada saat yang sama, Jepang juga membantu peningkatan jaringan gelombang mikro dan pembaruan jaringan telepon yang sudah usang. Pada tahun 1979 untuk pertama kalinya melakukan penyusunan master plan yang menjadi sektor pertama dari survei pembangunan. Pada paruh kedua tahun 1980-an melakukan perluasan jaringan telepon, Jepang membantu pembangunan kabel optik bawah laut sepanjang 410 km antara Surabaya-Banjarmasin. Memasuki tahun 1990-an, melalui Pembangunan Pusat Perbaikan Jaringan Telepon di Lapangan, Jepang telah memberikan kontribusi untuk membantu pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan jaringan utama Badan Usaha Milik Negara PT. Telkom Indonesia.

Di bidang penyiaran, sejak tahun 1970-an, Jepang telah membantu pendirian stasiun radio dan televisi milik negara, dan sejak tahun 1980-an, selain pengadaan peralatan, juga secara aktif terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Tinggi Multi Media (*Multi Media Training Centre*/MMTC) di Yogyakarta.

Sejak akhir tahun 1980-an, kedua bidang tersebut mulai terbuka untuk sektor swasta, sehingga Jepang pun mengalihkan bantuannya dari penyediaan dana untuk tujuan pengadaan infrastruktur, menjadi kerjasama teknik dan usulan-usulan kebijakan. Di antaranya, MMTC tidak hanya menjadi tempat untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran milik negara, tapi juga sumber daya manusia di bidang penyiaran swasta, dan seiring dengan perubahan zaman, MMTC telah beralih peran menjadi fasilitas penyiaran bertaraf internasional sejak akhir tahun 1990-an.

Saat ini, dalam menghadapi isu-isu global, Indonesia bersama dengan negara-negara tetangga di ASEAN, telah memulai langkah-langkah baru di bidang keamanan informasi.



Suasana pelatihan untuk negara-negara ASEAN (pelatihan keamanan cyber) (Foto: JICA)



Tenaga ahli Jepang sedang berdiskusi dengan pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto: JICA)

Hasil

- Jepang berkontribusi untuk menghubungkan kepulauan Indonesia, dan meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, melalui pembangunan jaringan komunikasi dan saluran telepon antar pulau, dimulai dengan pembangunan kabel komunikasi bawah laut sepanjang 410 km yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan.
- Jepang berkontribusi dalam integrasi sosial di Indoensia, dengan menghubungkan berbagai kelompok etnis, bahasa dan agama, melalui pembangunan stasiun radio dan televisi nasional serta peningkatan teknologi penyiaran.
- MMTC telah menyediakan program pelatihan untuk lebih dari 2.700 orang teknisi Indonesia dari stasiun penyiaran pemerintah, dan swasta, termasuk RCTI dan Trans TV. Dengan reputasi yang tinggi dalam program yang berorientasi pada praktik dan menggunakan fasilitas serta peralatan mutakhir pada saat itu, MMTC telah berkembang menjadi lembaga pelatihan yang dapat menjadi aset Kerjasama Selatan-Selatan untuk menerima peserta pelatihan dari negara lain.



1: Aktifitas belajar di MMTC (Foto: Jotaro Tateyama)
2: Sebuah studio yang disiapkan oleh siswa di MMTC
3: Peralatan perekaman dan penyuntingan di MMTC

Proyek Peningkatan Kapasitas Keamanan Informasi (2014 - 2017)

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, kerusakan karena serangan cyber telah meningkat secara global, dan penguatan langkah-langkah keamanan informasi melalui kolaborasi antar negara merupakan isu yang mendesak.

Berpijak pada latar belakang seperti ini, melalui kerangka kerja bilateral dengan Indonesia, Jepang melakukan kerjasama teknis dalam penguatan fungsi departemen terkait dan meningkatkan kesadaran. Selain itu, juga melaksanakan pelatihan untuk negara-negara ketiga yang ditujukan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei dan Timor Leste, yang mendukung peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk menghadapi isu-isu masyarakat global. Penanganan terhadap serangan cyber juga merupakan proyek pertama bagi JICA, namun berkat keberhasilan proyek ini, di negara-negara lain pun telah dimulai proyek serupa.

Pertanian dan Keamanan Pangan

Gambaran Umum

Di sektor pertanian dan keamanan pangan, Jepang telah mengambil langkah yang menjadi prioritas dan kebutuhan pada masa itu dengan membaca situasi Indonesia dan masyarakatnya.

Pada proyek irigasi yang terkait erat dengan peningkatan produksi beras, Jepang telah memberikan bantuan sekitar 300 miliar yen (USD 2,7 miliar*) terhadap lebih dari 50 proyek pinjaman ODA sejak "Program Rehabilitasi Irigasi Delta Brantas" pada tahun 1970-an, yang memberikan dampak besar bagi sektor pertanian dan keamanan pangan. Selain itu, juga dilakukan 3 tahap "Umbrella Koperasi" yang merupakan pelopor kerjasama program secara komprehensif. Di bidang peternakan, dilakukan kerjasama yang difokuskan pada alih teknologi, dengan pencapaian hasil yang baik, terutama dalam teknologi inseminasi buatan, hingga terlaksananya Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama bidang perikanan diarahkan untuk meningkatkan asupan protein melalui kerjasama akuakultur. Pembangunan pelabuhan untuk perikanan, khususnya pembangunan pelabuhan ikan di Jakarta, telah mendapatkan bantuan selama 40 tahun mulai dari perancangan dan konstruksinya pada tahun 1970-an, dengan jumlah total sekitar 16 miliar yen (USD 142 juta*).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketahanan pangan dan perbaikan kesenjangan terus dilaksanakan sebagai prioritas utama, melalui pengembangan agribisnis, pertanian yang berkelanjutan dan pemberian manfaat untuk para petani. Selain itu, dibentuk "Konsep Maritim Nasional" sebagai strategi penting untuk pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya perikanan laut yang berkelanjutan, serta memposisikan Indonesia sebagai negara maritim di dunia internasional sebagai strategi penting. Dengan demikian, diharapkan Jepang akan terus berkontribusi di sektor yang penting ini dalam pencapaian langkah-langkah kebijakan, dengan menerapkan pengetahuan seperti teknologi canggih yang memiliki keunggulan komparatif, kemitraan pemerintah-swasta.

*Kurs berdasarkan 1 Desember 2017.

Kerjasama secara Komprehensif melalui Umbrella Koperasi (1981 – 2000)

"Umbrella Koperasi untuk Pengembangan Pertanian dan Daerah Secara Integrasi (Umbrella Koperasi)" yang telah dilaksanakan sebanyak tiga tahap sejak tahun 1981 hingga tahun 2000, merupakan program kerjasama yang menjadi pelopor dilaksanakannya kerjasama lintas sektor secara komprehensif, di mana proyek dilaksanakan sebagai suatu paket untuk memecahkan masalah yang lebih besar dan sulit dicapai dengan satu proyek. Tahap pertama program berkontribusi pada peningkatan percepatan hasil panen padi sejak 1979 hingga 1982, dan pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 melalui produksi dan distribusi benih bermutu, penguatan perlindungan tanaman, pembangunan irigasi dan perbaikan proses setelah panen. Selain itu pada program selanjutnya dalam rangka memperluas target program panen, dilakukan alih teknologi budidaya sehingga meningkatkan produksi kentang dan kedelai, dan berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup petani. Teknologi yang dikembangkan dengan susah-payah dalam Proyek Perbenihan Kentang hingga saat ini pun masih dimanfaatkan. Pusat penelitian yang didukung oleh Jepang tersebut menjadi basis untuk budidaya kentang di Indonesia, melalui pendistribusian benih kentang murah dan kesuksesan pengembangan varietas baru yang tahan terhadap penyakit.



Pusat Pembibitan Kentang yang didirikan melalui Proyek Pembibitan Kentang



Ruang kerja di dalam Pusat Pembibitan Kentang

Hasil

- Melaksanakan proyek pinjaman ODA untuk pembangunan lebih dari 50 proyek irigasi dan merealisasikan perluasan sekitar 370.000 ha irigasi atau setara dengan 5,2% dari 7,14 juta ha irigasi pada tahun 2014 (berkontribusi terhadap produksi sekitar 2 juta ton/tahun).
- Berkontribusi pada peningkatan produksi hasil pangan utama seperti beras (sekitar 30 juta ton sampai sekitar 52 juta ton) dan kentang (sekitar 200.000 ton sampai sekitar 1 juta ton), melalui kerjasama yang dimulai dari Umbrella Koperasi (kerjasama kedua bidang tersebut sejak tahun 1981 hingga tahun 2002).
- Di bidang peternakan, setelah selesai proyek, jumlah produksi sperma beku meningkat secara signifikan dari 200.000 dosis (tahun 1985) menjadi 3,5 juta dosis (tahun 2015), sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi sapi domestik (sekitar 8 juta ekor sampai 13 juta ekor).
- Melalui pelabuhan ikan Jakarta, telah melahirkan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 50.000 orang di perusahaan pengolahan ikan swasta, sehingga setiap harinya diperoleh devisa sebesar 100 juta yen (USD 890.000*).
- Bidang peternakan dan budidaya padi telah berkembang menjadi Kerjasama Selatan-Selatan, dan wilayah kerjasamanya telah semakin meluas ke Afrika, Asia Tengah dan Amerika Selatan.



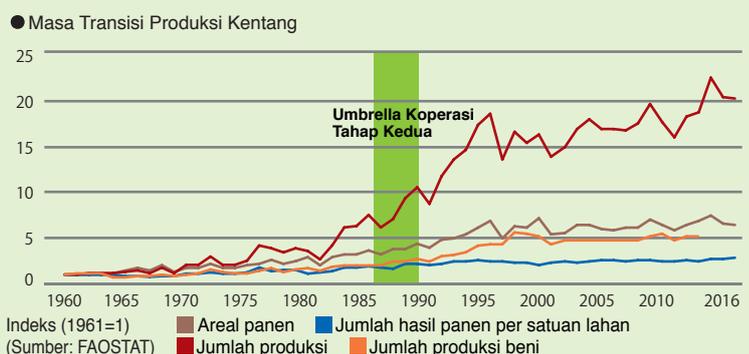
Pelabuhan ikan Jakarta (Foto: Sadao Orishimo/ OCG)



Tanggul pengatur di Ranau yang dibangun pada Proyek Irigasi Komerung Tahap I (Foto: Nippon Koei Co.,Ltd.)



Penanaman padi di sawah area irigasi (Foto: Nippon Koei Co.,Ltd.)



Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Gambaran Umum

Bantuan terhadap sektor pengembangan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dibagi menjadi tiga periode seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Pada tahun 1950-an-1960-an, Indonesia berupaya untuk meningkatkan produksi pangan dan mengembangkan listrik untuk industrialisasi. Sejalan dengan ini, Jepang telah membantu pembangunan 3 bendungan yang bersifat serba guna, Bendungan Karangates dan Bendungan Kali Konto di daerah aliran Sungai Brantas serta Bendungan Riam Kanan di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1970-an-1990-an, kerusakan akibat banjir yang serius terjadi setiap tahun di berbagai daerah aliran di Indonesia. Menanggapi hal ini, pertama-tama Jepang membuat Master Plan untuk melakukan studi pengembangan DAS secara menyeluruh, untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, irigasi dan pengembangan air untuk kota dan industri, terutama ditargetkan pada 3 daerah aliran (Sungai Brantas, Sungai Solo dan Sungai Jeneberang). Berdasarkan studi tersebut, telah dilaksanakan proyek jangka panjang secara terencana seperti pembangunan bendungan multiguna, pengembangan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, perbaikan sungai dan lain-lain.

Memasuki tahun 2000-an, kerjasama Jepang difokuskan pada rehabilitasi fasilitas pengendalian banjir dan sumber daya air yang sudah ada, serta penguatan kapasitas instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Sejak tahun 2008, juga dilakukan langkah-langkah untuk menghadapi isu-isu baru seperti Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM), penurunan tanah dan penanggulangan perubahan iklim.

Mengenai pengendalian banjir, secara berkesinambungan sejak tahun 1970-an, telah diberikan Pinjaman ODA yang bertujuan untuk pencegahan banjir di kota-kota besar di daerah.

● Hasil dari "Proyek Pengendalian Banjir Krueng Aceh" (1980-1993)



■ Jumlah Banjir Besar per Tahun (Sumber: JICA)

Hasil

- Sebagai hasil pengembangan daerah aliran sungai secara menyeluruh di Sungai Brantas, Sungai Solo, Sungai Jeneberang dan sungai-sungai lainnya, kerusakan karena banjir telah jauh berkurang yang membuat kehidupan warga lokal setempat menjadi stabil. Seiring dengan hal tersebut, melalui pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga air, pasokan air untuk kota dan industri serta pengembangan irigasi, telah memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup penduduk yang lebih baik.
- Di setiap DAS, telah dilaksanakan proyek jangka panjang secara sistematis sesuai dengan Master Plan. Melalui proyek ini, telah dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui kolaborasi antara teknisi Jepang dengan teknisi Indonesia ((contoh: Perusahaan PWS Bengawan Solo (perancangan), PT. Brantas Abipraya (pengerjaan konstruksi)).
- Pengenalan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) Melalui Penguatan Kapasitas Penggunaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Melalui proyek pengendalian banjir, kerusakan karena banjir (tingkat & frekuensi kerusakan) di kota Medan, Padang, Bandung dan Banda Aceh telah berkurang secara signifikan (menurut survei wawancara warga).



Bendungan Karangates (Foto: Nippon Koei Co., Ltd.)



Bendungan Lengkong Baru (Foto: Nippon Koei Co., Ltd.)

Pembangunan secara Menyeluruh Daerah Aliran Sungai Brantas (1961 - 2002)

Sungai Brantas adalah sungai yang memiliki daerah aliran sungai nomor dua terluas di Pulau Jawa. Bantuan Jepang dimulai dari pembuatan Master Plan secara menyeluruh, dan sejak tahun 1960-an, telah dilaksanakan total lebih dari 20 proyek melalui pinjaman ODA, antara lain pembangunan bendungan serbaguna, pengembangan irigasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, perbaikan sungai. Diantara kesemuanya, Bendungan Karangates merupakan bendungan terbesar di daerah aliran Sungai Brantas dalam hal kapasitas penyimpanan air dan keluaran pembangkit listrik yang efektif. Proyek pembangunannya merupakan proyek simbolis. Kemudian, dibangun fasilitas irigasi dengan memanfaatkan air yang dihasilkan dari bendungan yang selesai dibangun pada tahun 1973 tersebut. Selain itu, meningkatnya kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 105 MW telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pertanian dan industri lainnya. Melalui fungsi pengendalian banjir, perbaikan Sungai Porong, Sungai Surabaya dan lain-lain, bendungan ini juga telah membantu mengurangi banjir di daerah hilir Surabaya secara signifikan.



Bendungan Karangates (dilihat dari hilir ke hulu)(Foto: Nippon Koei Co., Ltd.)

Penanggulangan Bencana dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Gambaran Umum

Indonesia adalah salah satu negara dengan gunung berapi paling banyak di dunia, yang memiliki 130 gunung berapi aktif. Sejak lama Indonesia telah mengalami bencana alam akibat letusan gunung berapi dan aliran lumpur vulkanik. Di sektor ini, Jepang telah memberikan bantuan dalam hal mitigasi bencana dan rekonstruksi yang cepat pada saat terjadi bencana.

Sejak tahun 1970-an, Jepang telah membantu pengerjaan konstruksi sebagai langkah pengendalian erosi vulkanik termasuk bendungan terhadap Gunung Merapi, Gunung Semeru dan gunung-gunung lainnya. Terutama Gunung Merapi telah berulang kali meletus dalam beberapa tahun terakhir, dan setiap kali terjadi, Jepang melakukan bantuan peninjauan kembali perencanaan pengendalian erosi dan pembangunan fasilitas baru. Selain itu, juga membantu pengembangan sumber daya manusia dengan mendirikan Puslitbang Balai Sabo (makna kata Sabo dalam Bahasa Jepang adalah pengendalian erosi dan kata tersebut telah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia). Mengenai pengendalian banjir, Jepang telah membantu pengembangan daerah aliran sungai secara menyeluruh dan pencegahan banjir di kota-kota besar di daerah.

Memasuki tahun 2000-an, Indonesia mengalami serangkaian bencana besar seperti gempa bumi berskala besar di Pulau Sumatera dan tsunami di Samudera Hindia (Desember 2004), gempa bumi di Jawa Tengah (Mei 2006), gempa bumi di Padang (September 2009). Diawali saat mengirimkan Tim Bantuan Darurat Jepang, Jepang merespon bencana tersebut dengan memberikan bantuan tanggap-darurat, pemulihan dan rekonstruksi.

Dari pengalaman bencana-bencana tersebut dan juga pengaruh dari Konferensi Penanggulangan Bencana (PBB), di Indonesia, perhatian terhadap mitigasi bencana menjadi lebih tinggi daripada penanggulangan setelah terjadi bencana. Jepang, sejak sebelum pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia pada tahun 2008, telah membantu langkah-langkah mitigasi bencana (seperti perumusan rencana mitigasi bencana, pengaplikasian indeks risiko dan lain-lain) dan membentuk sistem mitigasi bencana di tingkat nasional maupun tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya, Jepang fokus untuk membangun sistem peringatan dini tsunami, memperkuat fungsi pemerintah untuk membuat bangunan tahan gempa. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian di kedua negara, telah dilakukan kerjasama sains dan teknologi (SATREPS) untuk meningkatkan sistem pengamatan tsunami dan gunung berapi, pembuatan metode pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana, perumusan rencana mitigasi bencana dan lain sebagainya.

Hasil

- Pada saat terjadi gempa berskala besar, Jepang telah mengirimkan tim bantuan darurat (28 kali sejak tahun 2001), sehingga berkontribusi terhadap rekonstruksi cepat daerah yang terdampak gempa.
- Berkontribusi dalam memperkuat teknologi dan kapasitas mitigasi bencana melalui langkah-langkah penanggulangan setelah letusan Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Galunggung, Gunung Kelud (pembangunan sekitar 250 bendungan sabo berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia).
- Melalui penguatan kapasitas di Balai Sabo dan kerjasama proyek penelitian SATREPS, Jepang telah berkontribusi dalam pembinaan 300 orang lebih teknisi yang siap kerja.
- Berkat proyek pengendalian banjir, kerusakan akibat banjir (tingkat dan frekuensi kerusakan) di Medan, Padang, Bandung dan Banda Aceh telah berkurang secara signifikan (menurut survei wawancara warga).
- Sejak pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (tahun 2008), Jepang mendukung penetapan langkah-langkah mitigasi bencana dan penguatan kapasitas pemerintah daerah (perumusan rencana mitigasi bencana daerah, peta risiko bahaya, mitigasi bencana oleh masyarakat dan lain-lain, di 2 provinsi dan 25 kabupaten/kota).



Bendungan Sabo yang dibangun di kaki Gunung Merapi (Foto: Yachiyo Engineering Co., Ltd.)

Bantuan Pemulihan Bencana Aceh (2004 - Sekarang)

Pada gempa bumi besar yang terjadi di Pulau Sumatera pada bulan Desember 2004, Pemerintah Jepang telah mengembangkan serangkaian proyek bantuan melalui pengiriman tim bantuan darurat segera setelah terjadinya bencana, pembuatan Master Plan untuk rekonstruksi Kota Banda Aceh melalui survei pembangunan darurat, bantuan untuk rekonstruksi masyarakat, rekonstruksi infrastruktur darurat, pembangunan kembali infrastruktur di sektor transportasi melalui Pinjaman Yen dan sumber air melalui Proyek Rekonstruksi Aceh (Pinjaman ODA). Melanjutkan 2 proyek tanggap-darurat, sejak tahun 2007 Jepang melaksanakan Proyek Perumusan Jaringan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di tahun 2007. Proyek ini mendukung penciptaan pendapatan masyarakat, pendidikan mitigasi bencana, dan pengembangan kapasitas pejabat pemerintah daerah Aceh.

Dengan memanfaatkan upaya dan hubungan jangka panjang tersebut, setelah terjadinya gempa bumi besar di Jepang bagian timur pada tahun 2011, proyek-proyek yang ditujukan untuk rekonstruksi pasca bencana melalui saling berbagi pengalaman di antara kota Banda Aceh dan kota Higashi Matsushima mulai dilaksanakan sejak tahun 2013. Kemudian, dengan ditetapkannya tanggal 5 November sebagai "Hari Tsunami Dunia," mulai tahun 2016 telah dikembangkan bantuan pendidikan mitigasi bencana dan pelatihan evakuasi yang mempererat hubungan Provinsi Aceh dengan Jepang. Salah satunya dengan mengundang siswa dari Provinsi Aceh untuk menghadiri "High School Students Islands Summit" dalam rangkaian acara "Hari Tsunami Dunia" untuk siswa SMA yang diselenggarakan di Jepang, sehingga hubungan Jepang dan Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini pun terus berkembang. Tidak hanya memberikan bantuan segera setelah terjadinya bencana, tetapi juga melalui bantuan jangka panjang, berdasarkan gagasan "Build Back Better" (rekonstruksi menjadi lebih baik), Jepang bersama dengan Provinsi Aceh sedang melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan pembangunan daerah yang tahan bencana.



Pelaksanaan latihan evakuasi di empat sekolah di Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Diikuti oleh sekitar 600 orang siswa dan guru (Foto: JICA)



Pertunjukan cerita bergambar tentang tsunami pada Seminar Penanggulangan Bencana Tsunami di Aceh (Foto: JICA)

Sistem Saluran Air dan Pembuangan/ Pengelolaan Limbah

Gambaran Umum

Jepang memulai bantuan kerjasama melalui bidang penyediaan sistem air bersih, yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia pada setiap era. Pada awal tahun 1960-an, telah dirumuskan master plan untuk penyediaan sistem air bersih di ibukota Jakarta, kemudian pada tahun 1970-an Jepang membantu melaksanakan pengadaan sistem air bersih seperti yang tertera dalam master plan. Pada tahun 1980-an, melalui "Pusat Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (WSESTC)," Jepang juga membantu dalam kerjasama teknis dengan membina sumber daya manusia untuk merancang dan mengelola pemeliharaan sistem penyediaan air bersih. Di tahun yang sama, kerjasama dalam sistem penyediaan air bersih di perluas ke kota-kota besar di berbagai provinsi dan pada tahun 1990an menjangkau ke pedesaan. Kemudian memasuki tahun 2000-an, seiring dengan terjadinya desentralisasi daerah, Jepang membantu peningkatan operasional dan pengelolaan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).

Bantuan dalam pengolahan air limbah dan drainase (kolam retensi), merupakan hal penting sebagai langkah pencegahan banjir yang merupakan bencana di perkotaan untuk meningkatkan lingkungan air, telah dimulai di Jakarta pada tahun 1980-an. Setelah mempersiapkan master plan saluran air dan air limbah, Jepang memulai bantuan dalam pengembangan saluran air. Kemudian proyek ini di perluas ke wilayah Denpasar dan Yogyakarta tahun 1990-an. Pada tahun 2010, program pinjaman dari ODA dalam sistem pembuangan limbah di Jakarta masih terus dirumuskan setelah dilakukan peninjauan ulang master plan tersebut.

Selain itu, dalam hal pengelolaan lingkungan yang terkait dengan polusi udara dan sungai, pada tahun 1990-an Jepang melalui ODA memberi bantuan pendirian Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) untuk pemantauan, penelitian dan pelatihan lingkungan. Sejak saat itu, kerjasama teknis terus berlanjut selama lebih dari 20 tahun. Kemudian, seiring dengan pelaksanaan bantuan pengadaan laboratorium dan tempat penelitian bagi pemerintah daerah, Jepang juga membantu pengembangan kapasitas bagi para pejabat pemerintah daerah.

Mengenai pengolahan limbah padat, Jepang memberikan bantuan pengembangan sistem dari pengumpulan hingga pengolahan akhir limbah, yang merupakan masalah serius di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1990-an. Pada tahun 2010-an, JICA telah mendukung kegiatan 3R (*Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur-ulang)), pengembangan kapasitas dalam pengelolaan limbah, dan penetapan Undang-undang Pengelolaan Sampah (No.18/2008) maupun peraturan serta regulasi terkait lainnya di tingkat regional maupun nasional di kota-kota percontohan.

Proyek Pengadaan Air Limbah di Denpasar (1991 - 2016)



Tempat Pengolahan Air Limbah di Denpasar (Foto: Setelah Laporan Evaluasi JICA)

Pada saat perencanaan proyek (tahun 1991), belum ada pasokan air bersih di Denpasar sebagai ibukota pulau Bali yang merupakan daerah tujuan wisata, sehingga air kotor langsung dialirkan ke saluran air dan sungai, yang dikhawatirkan akan mencemari laut sebagai sumber daya wisata. Saat itu, fasilitas pengolahan limbah di Indonesia hanya ada di delapan

kota, termasuk tujuh kota yang didirikan pada zaman Belanda, sedangkan pembangunan fasilitas pengolahan limbah yang modern baru saja dimulai. Meskipun terkena dampak krisis moneter dan serangan teroris di Bali, fasilitas tersebut selesai pada tahun 2008. Menurut survei, sekitar 80% warga yang menerima manfaat dari fasilitas tersebut menjawab bahwa fasilitas tersebut bermanfaat bagi perbaikan lingkungan sanitasi. Pada tahun 2016 dilaksanakan proyek tahap ke-2 yang cakupan wilayahnya telah diperluas. Setelah pembangunannya selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi bagi perbaikan lingkungan.

Hasil

- Memperbaiki lingkungan ibukota Jakarta, melalui bantuan di bidang penyediaan air bersih, saluran air dan pengelolaan limbah padat. Di dalamnya termasuk merealisasikan penyediaan air bersih bagi 3,4 juta orang yang baru pertama kalinya mendapatkan pasokan air bersih. Jepang juga membantu dalam hal pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA), dengan didirikan tempat pembuangan sementara untuk sistem pengumpulan sampah dan sistem transportasi.
- Sistem air bersih Surabaya dikembangkan di bawah program pengembangan lingkungan perkotaan, yang memberi manfaat kepada 60.000 kepala keluarga, sementara di Makassar (61.000 sambungan air bersih dikembangkan) dan kawasan pedesaan dikembangkan di bawah proyek pengembangan pasokan air bersih.
- Di sektor penyediaan air bersih, Jepang tidak hanya membangun fasilitas, tapi juga berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas organisasi, seperti pembinaan para teknisi Perusahaan Air Minum Daerah (pelatihan bagi 4.471 orang teknisi), perbaikan pengelolaan air bersih, peningkatan pelayanan dan lain-lain.
- Berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan air, melalui pengembangan saluran air limbah di Denpasar dan Yogyakarta (lihat artikel bawah).
- Sistem jaringan pemantau lingkungan pada sungai dan polusi udara yang berpusat di Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dibentuk. Pembentukan sistem ini berkontribusi dalam pengumpulan data kualitas udara dan air. Selain itu, kerjasama dengan Jepang juga telah membangun landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh daerah melalui peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penelitian, pengukuran, dan pemantauan lingkungan.



Balai Teknik Air Minum (WSESTC) kini



Stasiun Drainase Pluit (Foto: JICA)

Tata Kelola Pemerintahan

Gambaran Umum

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, Indonesia mengalami titik balik yang penting dalam demokratisasi dan desentralisasi. Menanggapi hal ini, sejak akhir tahun 1990 hingga tahun 2000-an, Jepang meningkatkan kerjasamanya di berbagai bidang sekaligus dalam sektor tata kelola pemerintahan, yaitu pemilihan umum, reformasi kepolisian, reformasi peradilan dan hukum, selain bidang statistik yang telah lama terjalin kerjasama. Pada bidang statistik, Jepang memberikan bantuan yang dilatarbelakangi oleh demokratisasi dan desentralisasi, seperti sensus penduduk tahun 2000, pembuatan daftar pemilih, statistik di wilayah kecil. Pada dua kali pemilihan umum tahun 1999 dan tahun 2004, Jepang memberikan bantuan dalam skala besar berupa rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyediaan kotak suara, bilik pemungutan suara, dan lain-lain. Pada bidang kepolisian, Jepang memberikan bantuan untuk menyebarkan konsep perpolisian masyarakat (POLMAS) yang terpisah dari tentara nasional melalui demokratisasi. Pada bidang hukum dan peradilan, Jepang memberikan bantuan teknik yang difokuskan pada bidang perdamaian dan mediasi. Bantuan yang mendukung momentum demokrasi memiliki arti penting dalam sejarah dan diplomasi politik. Pada saat bersamaan, dilakukan juga bantuan untuk membangun perdamaian dengan memfasilitasi proses rekonsiliasi komunitas melalui kegiatan sekolah paska konflik di Provinsi Maluku.

Sekitar tahun 2010-an bantuan untuk demokratisasi telah mencapai satu babak, di mana pada bidang kepolisian dan statistik, Indonesia telah menjadi basis Kerjasama Selatan-Selatan yang menerima pelatihan negara ketiga. Peningkatan kualitas demokrasi secara berkelanjutan merupakan hal penting untuk kestabilan pembangunan Indonesia, yang memiliki beragam agama dan etnis hidup berdampingan. Kerjasama di bidang pemerintahan terus dilakukan dengan difokuskan pada bantuan dari sudut pandang perbaikan lingkungan investasi seperti kekayaan intelektual, kerjasama kepolisian dan lain-lain, serta bantuan sistem pelaksanaan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).



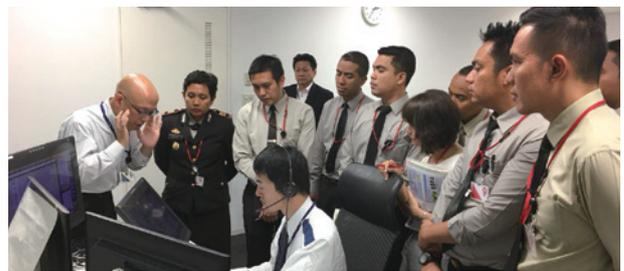
Koban yang dibangun dengan bantuan Jepang

Hasil

- Melalui penyediaan 79 unit OCR (*Optical Character Reader*/ alat pembaca karakter optik), dapat dilakukan penghitungan jumlah total penduduk pada sensus penduduk (tahun 2000), yang menjadi dasar pembuatan kebijakan di setiap instansi pemerintah. OCR juga dimanfaatkan untuk pengembangan daftar pemilih untuk Pemilu 2004.
- Memberikan bantuan sejumlah sepertiga dari total donasi pada pemilu tahun 1999 (sekitar USD 35 juta), penyediaan 620.000 kotak suara dan 1,22 juta bilik suara yang seluruhnya sejumlah seperempat dari total donasi pada pemilu tahun 2004 (sekitar USD 23 juta), sehingga dapat terwujud pemilu yang bebas dan adil, yang berkontribusi terhadap stabilitas masyarakat dan tegaknya demokrasi.
- Pembangunan 15 pos polisi (BKPM: Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) atau kepolisian sub-sektor/ Koban (Koordinator Bantuan), menerima pelatihan lebih dari 700 polisi di Jepang, dan kerjasama teknik melalui model kepolisian yang dekat dengan masyarakat, telah direfleksikan ke dalam sistem kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- Bidang statistik, pemilu dan perpolisian masyarakat telah berkembang menjadi Kerjasama Selatan-Selatan.



OCR (Foto: Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang)



Kunjungan ke Ruang Pengendali saat Pelatihan di Jepang (Foto: JICA)

Program Bantuan Reformasi POLRI (2001 - Sekarang)

Sosok polisi yang dulunya ditakuti oleh warga masyarakat telah lahir kembali sebagai sosok polisi yang hadir untuk warga masyarakat. Jepang telah mendukung reformasi penting ini selama bertahun-tahun. Di Bekasi, sebuah daerah pinggiran Jakarta, telah dibuat percontohan kegiatan perpolisian masyarakat (POLMAS), dengan melakukan berbagai alih teknologi di lapangan dari polisi Jepang kepada polisi Indonesia. Contoh yang representatif adalah "Sistem Pos Polisi" yang melindungi keamanan wilayah setempat melalui kunjungan ke rumah-rumah warga, untuk menjalin hubungan yang erat dengan warga, guna mengatasi berbagai masalah warga seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain-lain.

Polisi lapangan yang mendapatkan kepercayaan dari warga masyarakat dan berkegiatan secara aktif telah lahir di setiap wilayah, sehingga Kepala Desa mengatakan bahwa "Dulu semua orang takut kepada polisi, tapi sekarang kita dapat berkonsultasi dengan polisi apabila ada suatu masalah. Desa menjadi lebih aman daripada sebelumnya." Pos Polisi di mana Bekasi menjadi percontohnya telah lahir di setiap wilayah di seluruh Indonesia.



Petugas polisi berbicara tentang keamanan kepada anak-anak sekolah

Pembangunan Daerah

Gambaran Umum

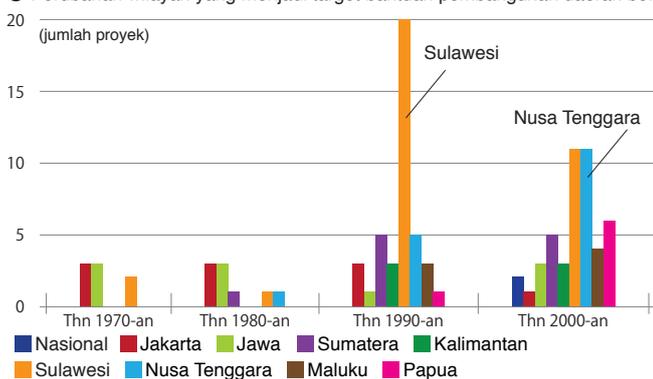
Pada sektor pembangunan daerah, dari tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, Jepang telah memberikan bantuan untuk mengembangkan master plan daerah secara terpadu termasuk rencana pengelolaan ekonomi makro terutama di Jawa, Bali dan Sumatera.

Pada tahun 1990-an, bagian Timur Indonesia termasuk Sulawesi menjadi wilayah prioritas kerjasama dan bantuan Jepang, dimana studi dan proyek pembangunan daerah dilakukan. Selain itu, diberikan Pinjaman Yen untuk proyek pengembangan infrastruktur daerah yang ditargetkan untuk wilayah bagian timur Indonesia. Mengenai pembangunan perumahan, dilakukan kerjasama terkait rencana pembangunan perumahan murah.

Setelah krisis moneter di tahun 1997, seiring dengan kemajuan desentralisasi, JICA memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan menciptakan mekanisme yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan agenda internasional dalam peningkatan keberhasilan/keefektifan untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2000-an, JICA melaksanakan program kerjasama pembangunan daerah yang bertujuan untuk melahirkan efek sinergi yang menggabungkan berbagai skema bantuan.

Dengan diberlakukannya Bantuan Desa yang muncul berkat Undang-undang Desa pada tahun 2014, dukungan pembangunan daerah mencapai tahapan baru. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan bantuan untuk wilayah perkotaan dengan pembangunan daerah, dalam rangka menuju pembangunan yang seimbang.

● Perubahan wilayah yang menjadi target bantuan pembangunan daerah berdasarkan era



Hasil

- Dimulai dengan bantuan pengembangan master plan pembangunan daerah terpadu yang dimulai di Provinsi Jawa Timur hingga di perluas jangkauannya hingga 40% dari total 27 provinsi (pada saat itu) sebelum tahun 1980-an. Melalui proses kerjasama ini, para pejabat administratif pusat & daerah dapat memperdalam pemahaman mengenai pola pikir pembangunan daerah. Selain itu, metode perencanaan pembangunan tersebut, dimanfaatkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah berdasarkan "Undang-Undang Rencana Tata Ruang" (tahun 1992).
- Pendekatan pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan daerah telah memberikan kontribusi pada penyusunan rencana pembangunan lima tahun yang seimbang.
- Sebagai contoh, sekitar 6.000 staf administrasi dan 4.700 fasilitator, termasuk 1.800 kepala kecamatan (Camat) yang mencakup 35% dari segenap kecamatan, berpartisipasi dalam program pelatihan yang disediakan oleh serangkaian proyek.
- Melalui kerjasama secara berkesinambungan sejak tahun 1970-an, telah dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (PUSKIM) yang berkontribusi terhadap pembangunan dan desain kompleks perumahan berharga murah maupun desain tahan gempa.



Visi dan Misi, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng



Maret 2016 Dewan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Musrenbang), Kota Makassar

Pendekatan *multi-stakeholder* untuk Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pengembangan Masyarakat (1997 - 2016)

Melalui desentralisasi sejak tahun 1998, peran utama pembangunan daerah telah beralih ke pemerintah daerah termasuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, JICA terus membantu dalam peningkatan kapasitas nasional, provinsi dan kabupaten/kota juga masyarakat. Dengan pendekatan *multi-stakeholder* ini, telah berhasil menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Misalnya, pada "Proyek Penguatan Masyarakat Desa untuk Mendukung Program Pemberantasan Kemiskinan di Sulawesi" (1997-2002), diberikan bantuan untuk meningkatkan komunikasi di antara para pihak terkait pembangunan seperti badan pemerintah daerah, masyarakat, NGO melalui sistem pendukung masyarakat atau SISDUK (Sistem Dukungan), yaitu suatu sistem di mana pemerintah daerah memberikan dukungan finansial terhadap usulan masyarakat. Pada "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) (RISE I & II)" (2007-2016), telah dilakukan pengembangan infrastruktur berskala kecil untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat, dengan memanfaatkan fasilitator. Selain itu, dilakukan juga pengembangan produk khas daerah, dan peningkatan kapasitas pejabat administratif daerah.



Meja pengeringan rumput laut yang dibuat oleh PNPM-PISEW di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (di bagian depan adalah tugu peringatan)

Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional

Gambaran Umum

Di sektor ini, Jepang yang dikenal sangat mumpuni dalam bidang teknik telah membantu dan membina institusi pendidikan tinggi secara berkesinambungan, dimulai dengan perluasan fasilitas di masing-masing universitas yang menjadi pusat pendidikan tinggi dalam bidang teknik di Indonesia, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1975. Pada tahun 1990-an, dilakukan peningkatan kualifikasi melalui jejaring antar universitas di dalam negeri, yang difokuskan untuk fakultas teknik di beberapa universitas di Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya, dari perspektif pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah pemerintah, dilakukan juga penguatan institusi pendidikan tinggi di bidang pertanian dan kesehatan. Dari sudut pandang yang sama, program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang melalui program belajar di luar negeri dan kerjasama bantuan pinjaman telah dilakukan dalam waktu yang lama. Ginandjar Kartasasmita yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) dari tahun 2010 sampai 2015 adalah salah satu alumni yang terkemuka.

Saat ini, melalui "The Southeast Asia Engineering Education Development Network (SEED-Net) Project," telah berkontribusi dalam peningkatan kapasitas pendidikan dan penelitian 4 universitas utama di Indonesia, yang juga telah menerima mahasiswa dari negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, untuk membangun Indonesia bagian timur, Jepang memberikan bantuan berbagai proyek kepada Universitas Hasanuddin. Suatu kerjasama teknis juga dilakukan untuk mendorong pembentukan lembaga akreditasi mandiri program studi keteknikan Indonesia, IABEE untuk meningkatkan kualitas keseluruhan pendidikan tinggi teknik di Indonesia.

Ke depan, institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah serta pengembangan dunia industri dan masyarakat Indonesia melalui kerjasama yang erat dengan dunia industri dan instansi pemerintah daerah, serta penguatan fungsinya sebagai pusat pengembangan daerah.

Hasil

- Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke Jepang dengan bantuan pinjaman yen dan program JICA lainnya mencapai lebih dari 3.000 orang, terutama dosen dan pegawai negeri sipil di pemerintah pusat dan provinsi. Sekitar 16% dosen-dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah lama menjalin kerjasama dengan Jepang pernah belajar di Jepang, dan di universitas tersebut Jepang menjadi negara tujuan utama untuk belajar.
- Berkontribusi terhadap perluasan akses pendidikan tinggi dan perluasan fungsi institusi pendidikan tinggi, melalui proyek pembangunan fasilitas pada institusi pendidikan tinggi (ITB, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Syiah Kuala, Universitas Mulawarman, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia serta Pusat Studi Jepang).
- Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi utama di Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap terciptanya lulusan berkualitas tinggi. Misalnya, di antara 828 inovasi yang dipilih oleh program Pusat Inovasi Bisnis dari 2008 hingga 2015, 323 (38%) diantaranya dikembangkan oleh IPB, sebagai inovasi terbanyak diantara semua universitas dan lembaga penelitian. Kemudian pada tahun 2015, IPB mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai universitas dengan jumlah paten komersial terbanyak.
- Dengan memperkuat jejaring antar universitas, jumlah penelitian bersama dan kolaborasi antar universitas yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah daerah semakin meningkat, serta dapat memperkuat kualifikasi para dosen secara berkesinambungan.
- Universitas dan politeknik yang diperkuat melalui bantuan JICA, telah menjadi institusi rujukan untuk Kerjasama Selatan-Selatan. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya telah menerima lebih dari 200 orang dosen peserta pelatihan dari sekitar 25 negara di Asia dan Afrika.



- 1: Seorang siswa melakukan percobaan produksi biodiesel (AUN/SEED-Net) (Foto: Kenshiro Imamura/ JICA)
- 2: Bahan pengganti tulang yang telah dibuat dalam bentuk produk, melalui penelitian bersama kolaborasi industri dan akademisi SEED-Net (Foto: UGM)
- 3: Gedung kampus yang dibangun pada Proyek Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (1986 - 2006)

Sebagai respon atas kebutuhan pengembangan teknisi tingkat menengah di Indonesia, JICA terlibat erat dalam pendirian dan penguatan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan sejak tahun 1986 telah dilakukan empat kali bantuan termasuk pembangunan dan perluasan fasilitas serta penguatan kurikulum pendidikan. Hasilnya, para lulusan dari Politeknik ini mendapat pengakuan yang tinggi dari dunia industri, dan telah berkembang menjadi politeknik terbaik di Indonesia, yang hingga saat ini terus menduduki peringkat pertama dalam peringkat politeknik di dalam negeri. Selain itu, kualifikasi yang telah diperkuat tersebut, dimanfaatkan untuk mendukung politeknik di negara lain di Asia dan Afrika melalui Kerjasama Selatan-Selatan.



Suasana Praktikum di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Pendidikan Dasar dan Menengah

Gambaran Umum

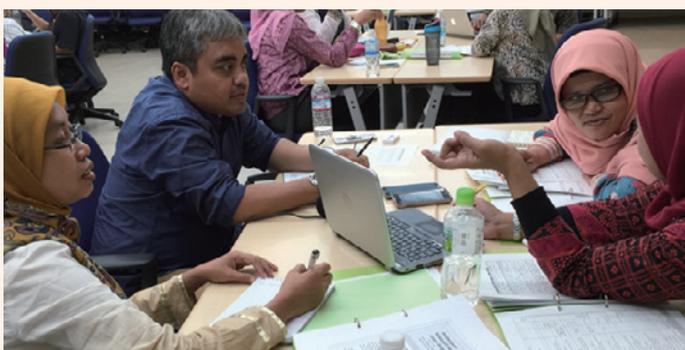
Di Indonesia, pada tahun 1994 telah dicanangkan kebijakan program wajib belajar 9 tahun yang memperpanjang wajib belajar hingga sekolah menengah pertama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada sektor pendidikan dasar dan menengah, Jepang telah memulai proyek pembangunan gedung sekolah menengah pertama sejak tahun 1995. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas mengajar para guru sekolah menengah pertama, sejak tahun 1998 telah dilaksanakan sebuah program untuk memperkuat universitas keguruan, dan sejak tahun 2003 telah diperkenalkan program "Lesson Study/Studi Pelajaran" untuk meningkatkan kapasitas mengajar para guru dengan metode pembelajaran bersama melalui praktik nyata di kelas. Kemudian, sejak tahun 1999, dalam rangka mengantisipasi desentralisasi, telah diberikan bantuan untuk perbaikan administrasi pendidikan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Percontohan perbaikan operasional sekolah yang dikembangkan melalui proyek yang sama dengan melibatkan sekolah, masyarakat, para pihak terkait di pemerintah daerah yang berwenang, serta peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan, selain disebarkan melalui anggaran Pemerintah Indonesia, juga digunakan pada proyek lainnya. Sehingga terbentuklah sistem Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia. Melalui bantuan menyeluruh dengan sasaran sekolah menengah pertama ini, JICA telah mendukung pencapaian target kebijakan program wajib belajar 9 tahun, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pada tahun 2010-an, dilaksanakan sebuah proyek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pembelajaran e-learning yang dilakukan oleh perusahaan swasta Jepang melalui kerjasama JICA, dan pelatihan Lesson Study di Jepang juga dilaksanakan sejak tahun 2013, hal ini berkontribusi dalam penyebarluasan metode Lesson Study di Indonesia.

Sektor pendidikan tingkat dasar dan menengah merupakan bagian yang membentuk fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi, namun masih ada masalah yang tersisa seperti perbaikan tingkat prestasi belajar, perbaikan kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya permintaan dari bidang industri yang mengharapkan peningkatan kemampuan akademis dasar yang lebih baik, sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia industri yang berkualitas tinggi, dapat dikatakan bahwa bidang ini masih membutuhkan bantuan lebih lanjut.



Suasana Lesson Study (Foto: Dr. Sumar Hendayana)



Suasana pelatihan Lesson Study dari Universitas keguruan di Jepang (Foto: Proyek Pelatihan JICA)

Hasil

- Meningkatnya rasio rata-rata pendaftaran sekolah dari 56,5% menjadi 67,9% (1995-2000) melalui pembangunan 596 gedung sekolah menengah pertama di 12 provinsi dalam "Proyek Pembangunan dan Renovasi Gedung Sekolah Menengah Pertama" yang berkontribusi terhadap pencapaian program wajib belajar 9 tahun.
- Lesson Study yang diperkenalkan pertama kalinya pada "Proyek Pendidikan Pengajar Matematika dan Sains Indonesia (IMSTEP) ," dan disebarluaskan melalui serangkaian proyek selanjutnya dipraktikkan secara luas di Indonesia termasuk di 67 universitas keguruan.
- Percontohan perbaikan operasional sekolah yang diperkenalkan melalui "Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah (REDIP)" telah disebarluaskan melalui proyek-proyek pemerintah, dan mitra pembangunan lainnya, sehingga pengelolaan sekolah berbasis partisipasi masyarakat yang tidak hanya mencakup lingkungan sekolah seperti guru, orang tua murid, tetapi juga masyarakat sekitar sebagai narasumber keterampilan hidup telah banyak dipraktikkan sehari-hari.
- Universitas keguruan yang telah diperkuat dengan bantuan JICA menjadi institusi rujukan untuk Kerjasama Selatan-Selatan, dan telah menyediakan pelatihan tentang Lesson Study ke Asia dan Afrika.



Suasana pembelajaran siswa melalui e-learning yang di kembangkan oleh perusahaan Jepang melalui bantuan JICA (E-Learning)

Lesson Study (2003-2013)

Di Indonesia kualitas pendidikan sekolah menengah pertama dan terutama rendahnya kualitas guru, merupakan masalah yang besar. Menanggapi hal tersebut, sejak tahun 2003 JICA telah memperkenalkan "Lesson Study" yang merupakan metode dari Jepang untuk meningkatkan kapasitas mengajar para guru, dalam bidang Sains dan Matematika di sekolah menengah pertama. Lesson Study terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: perencanaan, observasi/ praktik di kelas, dan evaluasi, yang bertujuan untuk meningkatkan cara mengajar guru dan pemahaman siswa melalui praktik di kelas, agar sesama guru dapat saling belajar satu sama lain.

Lesson Study telah disebarluaskan melalui proyek secara berkesinambungan sebagai metode yang efektif untuk memperkuat kapasitas para guru, dan berdasarkan keberhasilan ini, setelah selesainya proyek tersebut, Lesson Study disebarluaskan ke universitas-universitas keguruan di Indonesia dengan anggaran dari Pemerintah Indonesia, dan telah dilaksanakan pada tingkat sekolah di setiap daerah. Selain itu, pada evaluasi setelah pelaksanaan Lesson Study, disarankan agar pelaksanaan lesson study dapat berdampak pada peningkatan prestasi akademik siswa. Kemudian, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang memainkan peran utama dalam proyek ini, menerima peserta pelatihan dari Afrika dan Asia, sehingga telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan dan pengembangan Lesson Study di negara-negara ketiga.

Layanan Kesehatan dan Medis/ Jaminan Sosial

Gambaran Umum

Pada sektor layanan kesehatan dan medis/ jaminan sosial, sejak akhir tahun 1960-an, bantuan Jepang fokus untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi penyediaan layanan kesehatan, melalui perbaikan rumah sakit dan memperkuat sistem pendidikan untuk tenaga kerja bidang kesehatan. Sejak tahun 1980-an, beralih fokus pada bantuan tematik untuk memperkuat sistem kesehatan sesuai dengan kebutuhan pada masanya, seperti keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit menular, keamanan obat dan makanan. Selain itu, untuk mengantisipasi penyakit menular baru yang merupakan isu berskala global, telah dilanjutkan kerjasama teknis berdasarkan kebutuhan, dengan mengirimkan tim dari Tim Bantuan Darurat Jepang bantuan darurat segera setelah terjadinya kasus Flu Burung pertama pada manusia pada tahun 2005. Saat ini juga sedang dilakukan langkah-langkah penanggulangan penyakit menular melalui proyek kerjasama SATREPS.

Menanggapi kebutuhan pemenuhan jaminan sosial, pada tahun 1990-an Jepang berkontribusi pada kemajuan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pendirian dan dukungan operasional Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD). Setelah dimulainya sistem jaminan kesehatan nasional pada tahun 2014, Jepang berbagi pengalaman mengenai sistem jaminan sosial dan pengoperasiannya. Dari antusiasme Indonesia dalam hal ini, maka dimulailah bantuan untuk memperkenalkan secara penuh sistem kualifikasi tenaga kerja dan jaminan sosial.

Skala bantuan Jepang sedikit demi sedikit mulai berkurang, dengan semakin membaiknya indikator di bidang kesehatan dan perawatan medis juga jaminan sosial di Indonesia. Namun demikian, Indonesia diperkirakan memiliki masalah-masalah umum yang sama dengan Jepang seperti beban ganda karena penyakit menular dan tidak menular, penyakit yang timbul karena kebiasaan hidup, meningkatnya jumlah lanjut usia. Sehingga tetap dibutuhkan kerjasama dengan memanfaatkan pengalaman Jepang.



Seorang anak mendapat vaksin polio tetes
(Foto: Kenshiro Imamura/ JICA)

Hasil

- Berkontribusi dalam menciptakan pondasi bagi penyediaan layanan kesehatan, melalui perbaikan fasilitas 5 rumah sakit negeri kelas A, 13 rumah sakit umum negeri kelas B dan C. Selain itu juga berkontribusi dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang perawatan medis, melalui peningkatan fasilitas pendidikan keperawatan dan sistem pendidikan di fakultas kedokteran 4 universitas.
- Penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA), telah disebarkan kepada sekitar 80% ibu (hamil, bersalin, dan nifas) di 34 provinsi di seluruh Indonesia (Kementerian Kesehatan tahun 2016). Hal ini telah meningkatkan pengetahuan ibu, dan mendorong untuk menggunakan pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.
- Produksi vaksin domestik telah dicapai untuk vaksin oral polio (OPV) dan vaksin campak, dengan menyediakan 43 juta dosis untuk OPV dan 32,8 juta dosis untuk vaksin campak di Indonesia (2016). Selain itu, setelah selesainya proyek, 1,6 miliar dosis untuk OPV dan 21 juta dosis untuk vaksin campak telah diekspor ke 136 negara pada tahun 2015 (termasuk melalui pengadaan UNICEF).
- Berkontribusi dalam memajukan penyandang disabilitas di masyarakat, melalui penyediaan BBRVBD. Hingga tahun 2016 telah melahirkan 1.943 orang lulusan, 64% diantaranya sudah mendapatkan pekerjaan/ membuka lapangan kerja sendiri. Hal ini mendorong para penyandang disabilitas untuk mandiri.
- Bidang keluarga berencana, penggunaan Buku KIA, pembuatan vaksin, dan rehabilitasi kejuruan bagi para penyandang disabilitas telah berkembang menjadi Kerjasama Selatan-Selatan.



Suasana praktik kursus menjahit di BBRVBD di Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Pengenalan Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan Kerjasama Jepang (1993 - 2017)

Pengenalan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dimulai ketika dokter Indonesia berkunjung ke Jepang di pelatihan JICA dan melihat buku tersebut, lalu ada keinginan yang kuat untuk menerbitkan Buku KIA dalam versi Indonesia. Atas kerjasama JICA, Buku KIA mulai diperkenalkan pada tahun 1993. Pada tahun 2004 diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mendorong penggunaan Buku KIA bagi ibu hamil. Pada tahun 2006 buku tersebut sudah tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Menurut survei dari Kementerian Kesehatan, dipastikan bahwa dibandingkan dengan ibu yang tidak menggunakan Buku KIA, ibu yang menggunakannya lebih memilih persalinan yang ditangani oleh ahli medis, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah persalinan, serta mendapatkan vaksinasi. Kemudian, Indonesia berkontribusi terhadap pengenalan dan penyebaran Buku KIA di negara lain melalui pelatihan di negara ketiga yang dimulai pada tahun 2007, yang bertujuan untuk memperkaya kualitas pengalaman pelatihan Indonesia.



Relawan kesehatan menjelaskan mengenai makanan bergizi, dengan menggunakan catatan dari Buku KIA pada penyuluhan ibu-ibu



Buku KIA di Indonesia, diterbitkan dengan mempertimbangkan adat dan budaya daerah. Sampul depannya dibuat berbeda di beberapa provinsi

Penanggulangan Perubahan Iklim dan Konservasi Lingkungan Alam

Gambaran Umum

Sebagai negara yang kaya akan hutan hujan tropis dan memiliki keanekaragaman hayati, Indonesia merupakan negara kunci dalam memecahkan berbagai masalah perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di dunia. Dalam kerjasama dengan Jepang di sektor penanggulangan perubahan iklim & konservasi lingkungan alam, pada tahun 1970-an-1980-an telah dilakukan banyak proyek pembangunan industri kehutanan dalam hal pasokan kayu ke Jepang, namun memasuki tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap masalah keanekaragaman hayati, maka pada pertengahan tahun 1990-an telah didirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi di Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Indonesia memiliki 25% dari hutan bakau (mangrove) di dunia. Bakau tidak hanya berfungsi untuk memelihara kekayaan ekosistem, namun juga sebagai sumber yang membantu penyerapan dan penguraian karbon dioksida, serta memiliki fungsi pencegahan bencana sebagai pemecah gelombang alami (breakwater) untuk menanggulangi pemanasan global. Oleh sebab itu, Jepang telah membantu konservasi bakau di Indonesia selama lebih dari 20 tahun sejak tahun 1990-an. Selain itu, telah dilakukan juga bantuan jangka panjang melalui proyek konservasi pesisir pantai di Pulau Bali, dan pencegahan kebakaran hutan sejak pertengahan 1990-an.

Seiring dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap perubahan iklim, di Indonesia pun memasuki tahun 2000-an, Jepang memberikan dukungan penuh untuk menanggulangi perubahan iklim. Indonesia adalah negara perintis di dunia yang menerapkan Pinjaman ODA untuk menanggulangi perubahan iklim sejak tahun 2008, dan juga telah memberikan bantuan seperti Mekanisme Kredit Bersama (*Joint Crediting Mechanism/JCM*) dan REDD+. Melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pun, Jepang terus mendukung kerjasama sebagai mitra bagi Indonesia.

(Catatan)

REDD+ merupakan salah satu langkah untuk menanggulangi perubahan iklim, dengan memberikan insentif terhadap kegiatan yang mengurangi emisi gas rumah kaca dari hutan atau meningkatkan volume penyerapan hutan, dengan menekan kerusakan dan berkurangnya hutan, serta mendorong pengelolaan hutan secara berkesinambungan di negara-negara berkembang.

Pinjaman Program Penanggulangan Perubahan Iklim (2008 - 2010)

Proyek Penguatan Kapasitas dalam Strategi Penanggulangan Perubahan Iklim (2010 - 2015)

Proyek Bantuan Pengembangan Kapasitas untuk Pengembangan Karbon Rendah (2014 - 2017)

Dalam penanggulangan perubahan iklim di Indonesia, emisi gas rumah kaca dari penggunaan hutan dan lahan menduduki proporsi terbesar, oleh sebab itu, bagaimana memanfaatkan dan melestarikan hutan merupakan hal yang penting. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2009, JICA membantu penyusunan "Matriks Kebijakan" untuk penanggulangan perubahan iklim, dan memberikan Pinjaman Program Penanggulangan Perubahan Iklim (CCPL: *Climate Change Program Loan*). Dari bantuan tersebut, telah dilakukan pengarusutamaan langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim seperti rencana nasional untuk mengurangi dan menanggulangi emisi gas rumah kaca, serta terlihat kemajuan di bidang mitigasi melalui pengelolaan hutan dan pembangkit listrik tenaga panas bumi, serta di bidang adaptasi melalui pencegahan bencana, pertanian, pengelolaan sumber daya air dan hasil laut. Juga telah dibentuk Mekanisme Kredit Bersama (JCM: *Joint Crediting Mechanism*), dilakukan alih teknologi ke Indonesia yaitu teknologi pengurangan emisi gas rumah kaca, produk, sistem, layanan, infrastruktur dan lain-lain.

Hasil

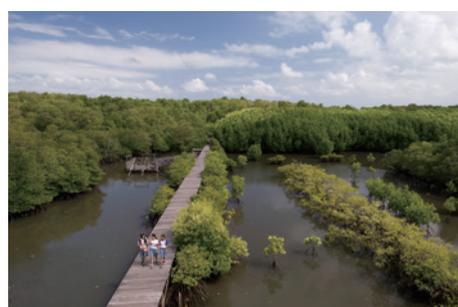
- Bantuan untuk menanggulangi perubahan iklim, yang dimulai dengan Pinjaman Program Penanggulangan Perubahan Iklim, telah berkontribusi pada pengarusutamaan perubahan iklim di dalam Pemerintah Indonesia dan peningkatan kapasitas Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim.
- Pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi telah memberikan kontribusi besar terhadap penelitian keanekaragaman hayati di Indonesia. Spesimen hewan, tumbuhan dan mikroorganisme di Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi tersebut, digunakan untuk penelitian dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelum proyek dimulai (pada tahun 2003), jumlah spesimen tanaman kering hanya terdapat 20.000 jenis, sedangkan setelah proyek selesai (pada tahun 2010), jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 730.000 jenis.
- Ditetapkannya kebijakan dalam perlindungan dan konservasi hutan yang dikelola bersama oleh pemerintah dan warga lokal setempat, telah berkontribusi pada pengembangan kemampuan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan melalui partisipasi warga lokal setempat. Telah dibentuk Manggala Agni (kelompok pemadam kebakaran), yang berakar pada masyarakat setempat, berdasarkan contoh pemadam kebakaran Jepang.
- Pendirian Pusat Informasi Mangrove (MIC) yang menjadi pusat penyebaran pelatihan terkait mangrove, pendidikan tentang lingkungan, dan ekowisata. Hasilnya, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 4.000 ha secara nasional yang dilakukan oleh para peserta pelatihan. Kemudian, pengetahuan dan keterampilan ini juga dibagikan kepada negara-negara ASEAN melalui proyek-proyek berikutnya.
- Berkontribusi dalam promosi wisata dengan melakukan pencegahan dan pemulihan erosi di tempat-tempat wisata di Pulau Bali, yaitu Pantai Kuta, Sanur dan Nusa Dua, serta proyek penguatan dermaga di Pura Tanah Lot dan lain-lain.



Pusat Penelitian Biologi
(Foto: Kenshiro Imamura/ JICA)



Latihan pemadam kebakaran yang dilakukan atas inisiatif warga sekitar kawasan hutan
(Foto: Mika Tanimoto/ JICA)



Jalan untuk berjalan kaki di dalam hutan bakau dan areal penanaman bakau
(Foto: Kenshiro Imamura/ JICA)

Kolaborasi dengan Berbagai Aktor

Bantuan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jepang ke Luar Negeri

Proyek bantuan pengembangan usaha kecil dan menengah ke luar negeri, dimulai sejak tahun 2012 sebagai bagian dari ODA, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi di dalam pemecahan masalah pembangunan, dengan memanfaatkan teknologi dan produk unggulan yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah Jepang untuk membangun negara-negara yang sedang berkembang. Proyek ini terdiri dari 3 skema pendukung (studi dasar, studi perencanaan proyek, penyebaran & demonstrasi) sesuai dengan tingkat kematangan usahanya. Di Indonesia sampai saat ini telah diterapkan dan dilaksanakan sejumlah 89 proyek yang difokuskan di bidang pemurnian & pengolahan air, pertanian, mitigasi & penanggulangan bencana, lingkungan hidup & energi dan pengolahan limbah (tabel di bawah).

● Jumlah Pelaksanaan Proyek Bantuan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah ke Luar Negeri di Indonesia per Bidang (per Januari 2018)

	TA2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016	TA2017	Total
Pemurnian & Pengolahan Air	2	3	2	5	2	9	23
Pertanian	-	1	4	2	4	4	15
Mitigasi & Penanggulangan Bencana	2	4	2	2	1	3	14
Lingkungan & Energi	1	3	4	1	3	-	12
Pengolahan Limbah	2	1	4	1	-	4	12
Lain-Lain	-	3	2	1	4	3	13
Total	7	15	18	12	14	23	89

Sumber: JICA website (https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/index.php)

Melalui skema tersebut, bertujuan agar teknologi dan produk usaha kecil dan menengah Jepang dapat dimanfaatkan oleh proyek ODA dan proyek pemerintah di banyak negara berkembang, serta menyebar melalui pasar, dan dapat memecahkan masalah pembangunan. Pada saat yang sama, pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah ke luar negeri juga bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi kedua belah pihak.

● Contoh Bantuan Pengembangan UKM Jepang ke Luar Negeri

Kebutuhan Indonesia

- Untuk menghadapi ledakan kenaikan populasi penduduk, perlu segera membangun infrastruktur bawah tanah seperti saluran pipa air limbah dll.
- Ada kebutuhan untuk meminimalkan dampak terhadap kemacetan lalu lintas, dan perlu metode yang sedapat mungkin meminimalkan open-cut.

↓

Teknologi Perusahaan & Usulan Kegiatan



[Teknologi Perusahaan]

- Metode propulsi adalah metode yang dapat memasang saluran pipa bawah tanah tanpa membongkar dan memotong permukaan tanah secara signifikan.
- Metode propulsi itu sendiri sudah ada di Indonesia, namun penggalannya hanya jarak pendek dan lurus saja.
- Usulan perusahaan, dengan teknologi pengukuran dan konstruksi Jepang yang canggih, dapat dilakukan penggalan jarak panjang dan kurva.

[Usulan Kegiatan]

- Penjelasan (seminar, dll) kepada pemerintah terkait di Indonesia mengenai metode & teknologi tersebut.
- Demo konstruksi di Indonesia untuk penggunaan peralatan dan pemesanan konstruksi yang tepat.

↓

Hasil Yang Diharapkan

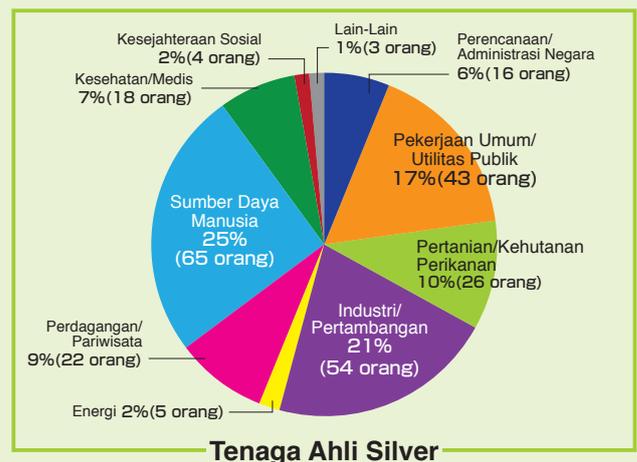
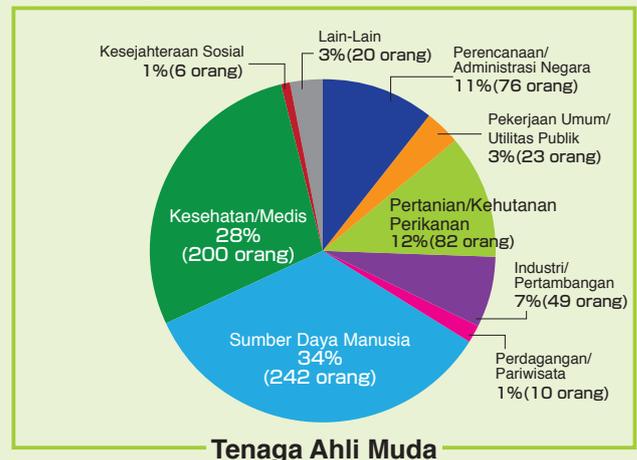
- Meningkatkan pemahaman para pihak terkait di Indonesia mengenai metode propulsi, dan mendorong rencana penggunaan metode tersebut pada pembangunan saluran pembuangan air limbah.
- Berpartisipasi di dalam proyek pekerjaan umum di Indonesia (pembangunan saluran pipa bawah tanah untuk pengendalian banjir) oleh perusahaan-perusahaan Jepang, dimulai dari usulan perusahaan ini.

"Penyebaran & Demonstrasi Teknologi Metode Propulsi pada Pengerjaan Konstruksi Saluran Pipa Air Limbah" (Tahun Anggaran 2012) (Sumber: Iseki Poly-tech, Inc.)

Tenaga Ahli Muda (JOCV: Japan Overseas Cooperation Volunteers)

Tenaga Ahli Muda (JOCV) diluncurkan pada bulan April 1965 sebagai program Pemerintah Jepang. Di Indonesia, perjanjian penugasan Tenaga Ahli Muda ditandatangani pada tahun 1987 sebagai negara ke 43, dan sejak tahun 1988 dimulai dengan mengirimkan 3 orang Tenaga Ahli Muda (2 orang perawat dan 1 orang pejudo). Hingga tahun 2016, telah dikirimkan 708 Tenaga Ahli Muda yang meliputi lebih dari 90 bidang keahlian, yaitu bidang pertanian, kehutanan dan perikanan seperti budidaya sayuran, peternakan, bidang pendidikan seperti pendidikan Bahasa Jepang dan pendidikan lingkungan, bidang layanan kesehatan seperti perawat dan bidan, bidang budaya seperti memasak dan kegiatan pemuda, serta bela diri (Judo), dan pendidikan olahraga. Sejak tahun 1998, mulai dikirimkan juga Tenaga Ahli Silver di berbagai bidang pekerjaan seperti pendidikan keperawatan, teknisi perkapalan, akuakultur, pengelolaan mutu, pengolahan logam, administrasi pendidikan, pengelolaan sekolah, dan lain sebagainya. Secara akumulatif hingga tahun 2016 telah dikirimkan sebanyak 256 orang.

● Pengiriman Relawan Berdasarkan Klasifikasi per Bidang & Jumlah Relawan (Sumber: JICA)



Para relawan tinggal bersama masyarakat setempat, dan dengan pandangan yang sama mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah. Selain itu, melalui proses pembauran budaya Indonesia, terjalin komunikasi dan saling mengenal satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa saling pengertian. Banyak pertukaran yang lahir melalui program ini. Program ini bertujuan untuk menciptakan ikatan yang kuat antara Indonesia dan Jepang, dan setelah para relawan kembali ke Jepang, pengalaman tersebut akan berguna untuk pembangunan daerah dan pemecahan masalah dalam komunitas lokal di Jepang.

Kerjasama Selatan-Selatan & Triangular

"Kerjasama Selatan-Selatan" adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang pembangunannya sudah relatif berkembang, dengan memanfaatkan pengalaman, sumber daya dari pembangunan di negaranya masing-masing, untuk membantu negara-negara yang belum berkembang. Sedangkan bantuan dari negara-negara maju terhadap program itu, disebut "Kerjasama Triangular."

Sebagai pemimpin gerakan non-blok, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dalam pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan di kawasan Asia-Afrika. Jepang yang memulai kerjasama ekonomi di Indonesia sejak awal tahun 1960-an, pada tahun 1981 telah memulai Kerjasama Triangular melalui program pelatihan di negara ketiga. Program ini dilakukan berdasarkan proyek kerjasama, dan selain memberikan rasa percaya diri bagi para pemangku kepentingan di Indonesia, juga menjadi tempat pembelajaran interaktif bagi kedua belah pihak.

Saat diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi untuk memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika Bandung, pada tahun 2006 dibentuklah Biro Kerja Sama Teknik di Kementerian Luar Negeri, saat itu bersamaan dengan dimulainya bantuan untuk memperkuat kapasitas Otonomi Palestina. Setelah menjadi anggota G20, kesadaran Indonesia sebagai "negara yang mewakili suara dari negara-negara berkembang" pun semakin meningkat, sehingga pada tahun 2010 dibentuk Tim Koordinasi Nasional, untuk mengawasi secara terpadu Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi, dan sejak saat itu dimulailah langkah-langkah pembentukan badan bantuan yang independen untuk memanfaatkan KSST secara lebih strategis. Berpijak pada pengalaman Kerjasama Triangular yang panjang, Jepang memberikan dukungan terhadap Tim Koordinasi Nasional tersebut.

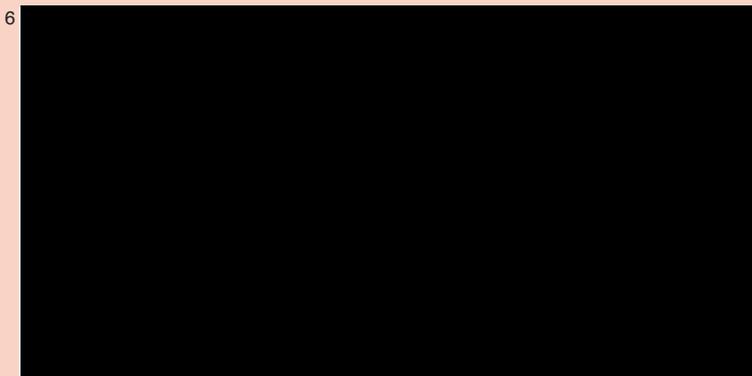
Kelebihan Indonesia adalah sebagai "guru yang baik dengan menyampaikan pengalamannya sendiri yang belum memudar." Dilihat dari perspektif sebagai pihak yang diberi bantuan, ada sisi contoh baiknya, yaitu masa depan menjadi jelas terlihat. Misalnya, di Jepang yang telah mengembangkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dari beberapa dekade yang lalu, sudah tidak ada lagi orang yang dapat mengajarkan keseluruhan proses pengembangannya. Namun di Indonesia yang telah menyelesaikan dari pengembangan sampai penyebaran Buku KIA, dapat mengajarkan dengan baik bagaimana melaksanakan pengembangannya, apa yang menjadi kesulitan dan apa yang harus dilakukan. Selain itu, dalam hal bantuan ke Afrika juga dianggap memiliki potensi kerjasama yang besar, dimulai dari bidang pertanian dengan teknologi tepat guna, kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia industri, dan lain-lain.

Sejak tahun 1994 hingga tahun 2016, Pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan Jepang, mengimplementasikan 57 proyek Kerjasama Triangular dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari 31 proyek kerjasama Jepang. Ke depannya, diperkirakan akan semakin banyak kesempatan bagi Indonesia dan Jepang untuk saling bergandengan tangan memberikan bantuan ke berbagai negara Asia & Afrika dalam berbagai bidang.

5: Timor Leste: Praktik pemeliharaan alat berat
6: Afghanistan: Praktik survei wawancara di masyarakat
7: Palestina: Observasi di tempat pengepulan produk pertanian
(5-7: Foto: JICA)



1: Tenaga Ahli Muda di bidang pendidikan lingkungan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah memberikan ceramah
2: Tenaga Ahli Silver di bidang akuakultur membantu memperkenalkan teknologi baru untuk di Pusat Pengembangan Akuakultur mengenai sampah
3: Tenaga Ahli Muda beladiri (Judo) mengajar para di sekolah pendidikan
4: Tenaga Ahli Silver di bidang pengolahan logam atlet membantu peningkatan pengelolaan mutu di jasmani pabrik pengecoran
(1-4: Foto: JICA)





Para anggota komunitas yang bekerjasama membangun rumah mereka secara gotong royong (Foto: Kimio Takeya/JICA)

Fitur 2

Peringatan Ke-60 Tahun dan Periode Selanjutnya

Berpikir Bersama, Berjalan Bersama – Saling Belajar antara Indonesia dan Jepang

Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan dihadapkan dengan berbagai bencana alam, Indonesia dan Jepang telah banyak menghadapi masalah yang sama. Dalam kerjasama Indonesia-Jepang selama 60 tahun terakhir yang diperkenalkan di dalam buklet ini, Jepang menyampaikan pengalamannya di berbagai bidang kepada Indonesia, dengan mempertimbangkan persamaan antar kedua negara. Sejarah tersebut bukan berarti menerapkan

semua yang disampaikan dari Jepang, tapi menjadikannya sebagai contoh untuk diterapkan dengan cara Indonesia. Selanjutnya, kerjasama dengan Indonesia tersebut juga telah melahirkan contoh-contoh yang dapat dijadikan pelajaran bagi Jepang. Diharapkan kerjasama semacam itu akan semakin meningkat di masa mendatang. Di sini akan diperkenalkan 3 contoh, yaitu kerjasama jangka panjang mitigasi bencana dan 2 kerjasama yang baru saja dimulai.

Penanganan Mitigasi Bencana – Sejarah Saling Belajar

Jepang dan Indonesia memiliki persamaan karakteristik bencana, karena sama-sama terletak di zona vulkanik Lingkaran Api Pasifik, dengan curah hujan yang juga tinggi. Sejak tahun 1970-an hingga sekarang, Jepang terus melanjutkan kerjasama dengan Indonesia yang terkait dengan bencana gunung berapi. Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana vulkanik di Indonesia, mencakup bidang yang luas mulai dari pembinaan sumber daya manusia hingga pembangunan fasilitas.

Di Jepang, ada 50 gunung berapi yang berpotensi meletus dalam jangka menengah sampai jangka panjang, di Indonesia bahkan ada 130 gunung berapi yang masih aktif, frekuensi letusannya juga sering dan beragam. Oleh sebab itu, temuan dan pengetahuan baru mengenai aliran piroklastik aktif, aliran debris atau contoh kerusakan fasilitas pengendalian pasir juga dijadikan sebagai umpan-balik bagi Jepang melalui survei dan riset. Misalnya, ketika Gunung Unzen meletus pada tahun 1991, aktivitas letusannya mirip dengan Gunung Merapi, sehingga aliran piroklastik yang terjadi karena letusan itu disebut sebagai "Aliran Piroklastik Merapi." Dengan demikian, pengalaman dari Gunung Merapi dapat dimanfaatkan juga untuk penanggulangan bencana Gunung Unzen. Ada juga contoh-contoh dari Gunung Merapi yang diterapkan dalam "Pedoman tentang Sistem Evakuasi dan Mitigasi bencana Gunung Berapi" yang disusun oleh Kementerian Pertanian, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, pada tahun 2007.

Pada gempa bumi di Jawa Tengah tahun 2006, Jepang memberikan bantuan teknis mengenai teknologi tahan gempa dalam pembangunan kembali perumahan. Pada saat itu, pemerintah daerah membentuk kelompok masyarakat untuk merekonstruksi rumah mereka yang mirip dengan tradisi Indonesia yang disebut gotong-royong, dan menjadikan mereka penerima bantuan finansial untuk membangun rumahnya kembali. Secara umum, bagi orang-orang yang rumahnya mengalami kerusakan serius akibat bencana, rekonstruksi perumahan adalah tugas yang sulit, dan sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan dengan cepat. Namun, berkat kelompok gotong royong ini, lebih dari 100.000 rumah telah dipulihkan dalam setahun. Dapat dikatakan bahwa gotong royong merupakan cara pendekatan yang menarik dan dapat dijadikan contoh oleh Jepang.

- 1: Tenaga ahli Jepang dan Indonesia melakukan riset lapangan di Gunung Semeru
- 2: Para ahli riset Jepang pun mengunjungi Pusat Teknologi Pengendalian Pasir yang telah lama mendapatkan bantuan dari Jepang
- 1-2: (Foto: Pusat Teknologi Pengendalian Pasir)
- 3: Dam Sabo yang dibangun dengan bantuan ODA Jepang rusak akibat aliran lahar dingin saat meletusnya Gunung Merapi pada bulan November 2010 (Foto: JICA)



Jaminan Sosial – Permasalahan Bersama Bagi Generasi Selanjutnya

Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255 juta orang pada tahun 2015, dan rasio penduduk berusia 65 tahun ke atas (rasio lanjut usia) adalah 5,2% dari total jumlah penduduk (Bank Dunia). Di sisi lain, rasio lanjut usia (lansia) di Jepang adalah 26,7% (2015), sehingga menjadi negara dengan rasio lansia paling besar di dunia. Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah lansia lebih cepat. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperkirakan pada tahun 2021 "masyarakat lansia" (rasio lansia sebesar 7%), sedangkan pada tahun 2038 sebesar 14%.

Peningkatan jumlah lansia merupakan tantangan bersama bagi Jepang dan Indonesia. Meskipun bidang, sistem dan penanggulangan di kedua negara berbeda, namun perlu kerjasama "berpikir bersama, berjalan bersama" dengan saling berbagi pengalaman dan contoh-contoh yang baik.

Dalam Proyek Kerjasama Teknis JICA yang dimulai pada tahun 2014, Jepang memperkenalkan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jepang dengan bentuk yang disesuaikan Indonesia bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial.



Suasana latihan olahraga di pos pelayanan terpadu untuk lansia (Provinsi Sulawesi Selatan) (Foto: Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan)

Di Indonesia, perawatan lansia berbasis komunitas telah dimulai sejak tahun 2010 di seluruh Indonesia. Di pos pelayanan terpadu lansia di setiap kelurahan, para relawan membantu mengukur tekanan darah, memberikan pengajaran mengenai gizi dan olahraga, serta mendukung kesehatan para lansia. Selain itu, untuk memberdayakan lansia, dilakukan perawatan ibu dan anak oleh relawan lansia, serta diberikan bantuan untuk menjalankan usaha kecil. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan fungsi gotong royong dan pemberdayaan lansia seperti ini merupakan pengetahuan yang dipelajari oleh Jepang dari Indonesia, yang bertujuan untuk membangun sistem perawatan terpadu di daerah pada tahun 2025.

Dibandingkan dengan Jepang yang baru mulai melakukan penanggulangan setelah terjadi peningkatan jumlah lansia, Indonesia telah mengambil langkah lebih cepat. Dengan memanfaatkan kekuatan dari komunitas masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mempraktikkan langkah-langkah penanggulangan peningkatan jumlah lansia dengan lebih baik.



Suasana pengukuran kadar gula darah di pos pelayanan terpadu untuk lansia (Provinsi Sulawesi Selatan) (Foto: Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan)

Bantuan Pelaksanaan Sistem SDGs – Kemitraan Menuju Tujuan Bersama

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*: SDGs) diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan dunia dimana "tidak ada seorang pun yang tertinggal" pada tahun 2030, dilakukan penyelarasan dalam 3 unsur utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan. Untuk mencapai 17 tujuan (goal) dan 169 target, setiap negara diminta untuk menyusun rencana kerja dan melakukan pemantauan terhadap kondisi perkembangannya.

Setelah Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap SDGs, sejak Januari 2017, JICA melakukan "pengumpulan informasi dan survei terkait perencanaan dan pelaksanaan operasional SDGs." Sebagai proyek percontohan, JICA memberikan bantuan dalam menetapkan target SDGs, menyusun rencana kerja dan membangun sistem evaluasi pemantauan. Survei ini merupakan proyek global JICA yang pertama untuk bantuan SDGs, yang juga membantu pelaksanaan SDGs di suatu negara secara keseluruhan, bukan hanya di salah satu sektor tertentu. Di tahun 2018 JICA berencana akan memulai Proyek Kerjasama Teknis dalam SDGs dengan BAPPENAS.

Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium (2001-2015), SDGs tidak hanya ditujukan bagi negara-negara berkembang, tapi juga semua negara di dunia termasuk negara-negara maju. Oleh sebab itu, sementara Jepang mendukung Indonesia dalam isu-isu di atas dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu dalam pengaturan indikator kebijakan, dan lain-lain, dalam waktu yang sama Jepang pun mulai melaksanakan SDGs seperti halnya Indonesia. Kedua negara ini mengatasi isu kebijakan yang sama, sehingga kerjasama SDGs ini dapat dikatakan sebagai kerjasama

di mana kedua Negara "berjalan bersama." Jepang menempatkan kerjasama dalam sistem pelaksanaan SDGs di negara-negara berkembang sebagai salah satu langkah kebijakannya untuk mencapai tujuan SDGs ke 17, yaitu "Memperkuat sarana pelaksanaan SDGs dan mengaktifkan kemitraan secara global untuk pembangunan SDGs yang berkesinambungan." Melalui kerjasama dalam sistem pelaksanaan SDGs di Indonesia, diharapkan kedua negara dapat saling berbagi pengalaman secara real time dan menjadikannya lebih baik.

Melalui proyek-proyek ODA dan lain-lain, Jepang dan Indonesia telah berpikir dan berjalan bersama. Di dalam sejarah ini, kedua negara telah mengumpulkan berbagai pengalaman, saling belajar satu sama lain, dan membangun hubungan kepercayaan yang mendalam. Di dalam buklet ini diberikan contoh-contoh kerjasama untuk mengatasi isu-isu global seperti penanggulangan perubahan iklim, penanggulangan keamanan informasi dan lain-lain, serta contoh-contoh Kerjasama Selatan-Selatan. Selanjutnya, diharapkan kedua negara akan terus belajar satu sama lain, serta bergandengan tangan sebagai mitra di dalam isu-isu global.

Kerjasama Jepang Dilihat Dalam Data

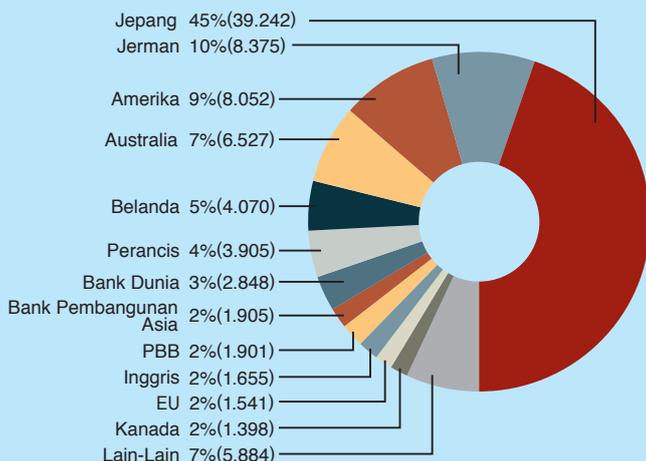
Pengantar

Jepang menyumbangkan 45% dari total bantuan ODA dari semua mitra donor ke Indonesia sejak tahun 1960. Hal ini menjadikan Jepang sebagai negara donor terbesar di Indonesia. Bab ini akan memaparkan jumlah pengeluaran akumulatif ODA ke Indonesia berdasarkan mitra donor, jumlah pencairan dana bantuan Jepang dalam 3 skema yaitu Kerjasama Teknik, Pinjaman dan Bantuan Hibah, berdasarkan klasifikasi per bidang JICA, dan jumlah peserta pelatihan serta tenaga ahli JICA yang dikirim berdasarkan klasifikasi yang sama (klasifikasi bidang ini berbeda dengan klasifikasi sektor pada buklet).

Total Jumlah Pengeluaran Akumulatif ODA

Jumlah Pengeluaran Akumulatif ODA untuk Indonesia per Organisasi Pemberi Bantuan

(sejak tahun 1960 hingga tahun 2016, satuan: Juta USD)



Sumber: OECD

Catatan: Tidak termasuk pinjaman Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD: International Bank for Reconstruction and Development) dari Bank Dunia dan sumber daya modal biasa (OCR: Ordinary Capital Resources) dari Bank Pembangunan Asia. Bila termasuk pinjaman tersebut, maka sebagai panduan, 3 pihak yaitu Jepang, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia akan menjadi sekitar 1/3 dari total.

Jumlah pengeluaran akumulatif ODA untuk Indonesia sejak tahun 1960 sebesar USD 87,3 miliar. Dari jumlah tersebut, Jepang menyumbangkan sebesar 45% (USD 39,2 miliar), jauh lebih besar dari negara dan organisasi pemberi bantuan lainnya. Di urutan kedua adalah Jerman (10%, USD 8,4 miliar), diikuti oleh Amerika (9%, USD 8,1 miliar) dan Australia (7%, USD 6,5 miliar).

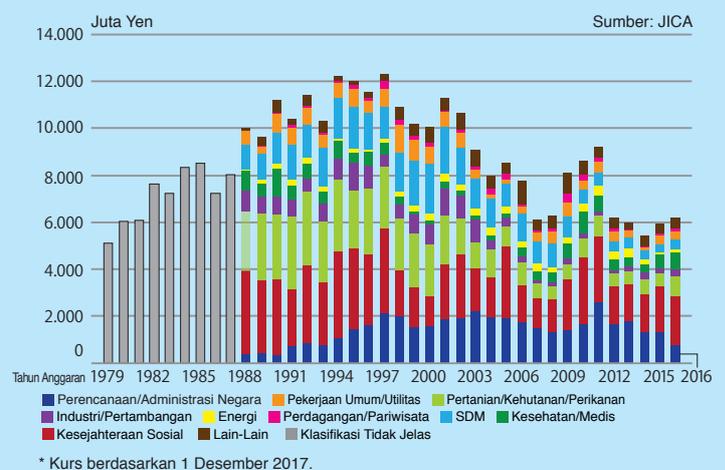


Tim Bantuan Darurat Jepang (Kenshiro Imamura/JICA)

Klasifikasi per Bidang & Jumlah Aktualnya

Jumlah pengeluaran akumulatif untuk Kerjasama Teknik sejak tahun 1954 hingga tahun 2016 sebesar 351,1 miliar yen (USD 3,1 miliar*). Menurut data sejak tahun 1988, mengenai capaian klasifikasi per bidang, diketahui bahwa sekitar separuh dari jumlah pencairan dana bantuan tersebut diduduki oleh 5 sub-bidang dengan urutan sebagai berikut : administrasi negara (31,7 miliar yen, 12,0%), sumber daya manusia (31,3 miliar yen, 11,8%), transportasi (30,3 miliar yen, 11,5%), pertanian (26,8 miliar yen, 9,8%) dan infrastruktur sosial (19,7 miliar yen, 7,4%).

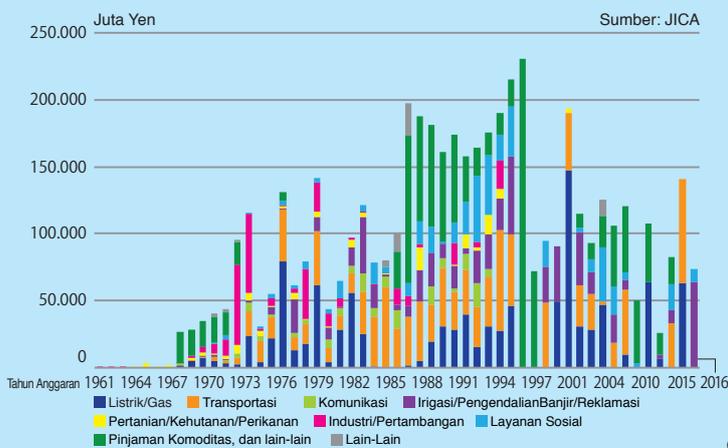
Jumlah Bantuan Dana untuk Kerjasama Teknik (sejak TA 1979 hingga TA 2016)



Proyek Peningkatan Kapasitas Penelitian untuk Pengelolaan Koleksi dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Foto: Kenshiro Imamura/JICA)

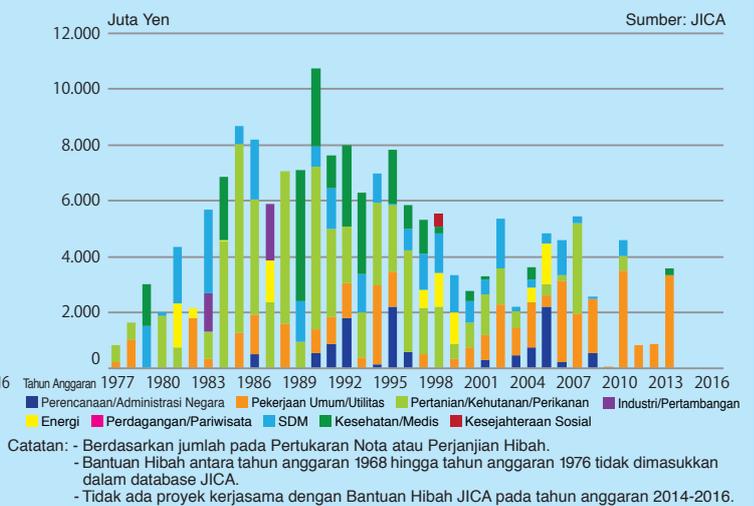
Jumlah pengeluaran akumulatif Pinjaman sejak tahun 1961 sebesar 5 triliun 7 miliar 508 juta yen (USD 44,6 miliar*). Untuk sub-bidangnya, pinjaman komoditas dan lain-lain tampak menonjol (1 triliun 235,9 miliar yen, 24,5%), diikuti oleh pembangkit listrik (674,1 miliar yen, 13,5%), irigasi, pengendalian banjir, reklamasi (587,4 miliar yen, 11,7%), jalur kereta api (425,6 miliar yen, 8,5%) dan jalan raya (357,4 miliar yen, 7,1%). Pinjaman dan Investasi Swasta dimulai sejak tahun 1961, sedangkan Pinjaman Yen dimulai sejak tahun 1968.

● Jumlah Pinjaman (jumlah dana yang disetujui) (sejak TA 1961 hingga TA 2016)



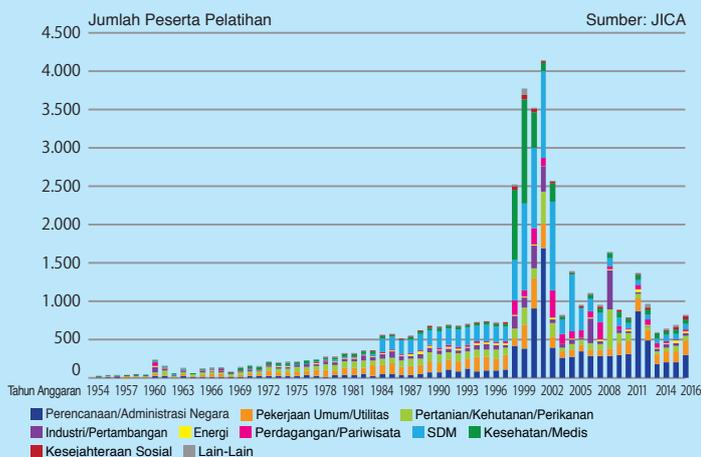
Jumlah akumulatif Bantuan Hibah sejak tahun 1977 sebesar 175,7 miliar yen (USD 1,6 miliar*). Untuk sub-bidangnya, bidang pertanian tampak menonjol (54,7 miliar yen, 31,2%), diikuti oleh pelayanan kesehatan & medis (23,8 miliar yen, 13,5%), sumber daya manusia (22,4 miliar yen, 12,7%), transportasi (17,9 miliar yen, 10,2%), utilitas publik (12,4 miliar yen, 7,1%). Apabila digabungkan, 5 bidang tersebut mencapai sekitar 3/4 dari jumlah pencairan dana bantuan.

● Jumlah Bantuan Hibah (sejak TA 1977 hingga TA 2016)



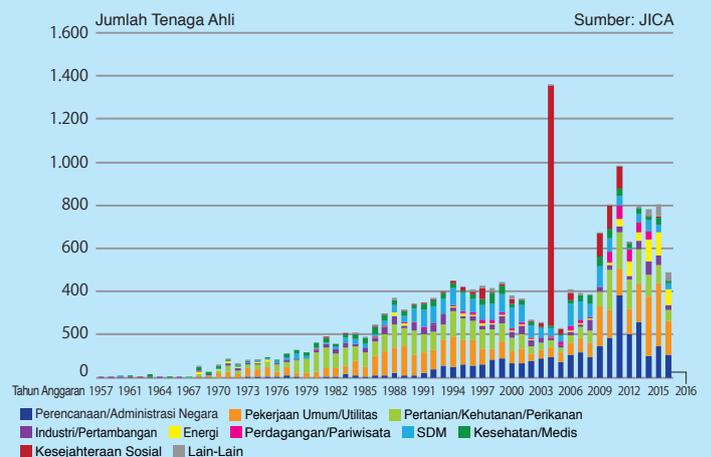
Jumlah Peserta Pelatihan dan Tenaga Ahli: Klasifikasi per Bidang

● Jumlah Penerimaan Peserta Pelatihan JICA (sejak TA 1954 hingga TA 2016)



Catatan: Termasuk juga peserta pelatihan negara ketiga yang mengikuti pelatihan di Indonesia. Jumlah akumulatif penerimaan peserta pelatihan JICA sebanyak 44.023 orang. Untuk sub-bidangnya, sumber daya manusia (10.057 orang, 22,8%), administrasi negara (8.459 orang, 19,2%), diikuti oleh pelayanan kesehatan dan medis (4.828 orang, 11,0%), industri (3.372 orang, 7,7%) dan pertanian (2.705 orang, 6,1%).

● Jumlah Pengiriman Tenaga Ahli JICA (sejak TA 1957 hingga TA 2016)



Jumlah akumulatif pengiriman tenaga ahli JICA sebanyak 17.459 orang. Untuk sub-bidangnya, administrasi negara (2.561 orang, 14,7%), sumber daya manusia (1.698 orang, 9,7%), kesejahteraan sosial (1.661 orang, 9,5%), dan pertanian (1.564 orang, 9,0%). Pengiriman tenaga ahli untuk bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2004 tampak menonjol, hal ini dikarenakan termasuk tim bantuan darurat internasional yang dikirimkan untuk membantu saat terjadi gempa dan tsunami di Pulau Sumatera (termasuk tim pasukan bela diri sebanyak 1.111 orang).

Beberapa Proyek ODA Jepang yang Dilaksanakan di Indonesia



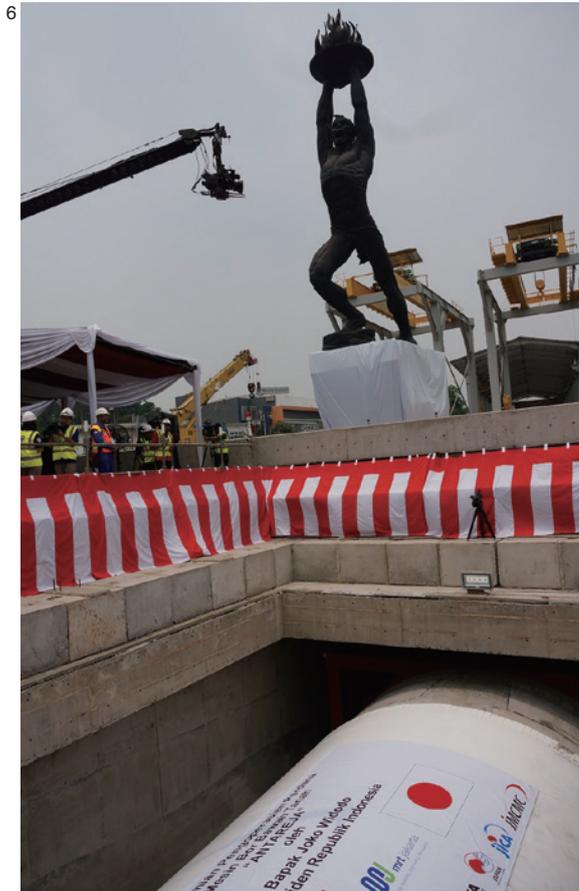
1: Bagian Dalam Terowongan MRT
Pengerjaan konstruksi dalam proyek pembangunan MRT Jakarta mengaplikasikan metode shield. Pengoperasian Tunnel Boring Machine dilakukan oleh 100 teknisi Indonesia yang telah mendapatkan bantuan alih teknologi dan 5 teknisi Jepang. Melalui proyek ini, JICA tidak hanya melakukan pengerjaan konstruksi, namun juga berkontribusi dalam alih teknologi (meningkatkan kapasitas teknologi Indonesia). (Foto: SHIMIZU CORPORATION)

2: Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang Telah Dipergunakan di 25 Negara
Buku KIA yang merupakan bantuan Pemerintah Jepang telah digunakan di banyak negara di dunia. Indonesia dan Jepang telah melaksanakan Kerjasama Selatan-Selatan/ Triangular dengan 25 negara, antara lain Palestina, Timor Leste, Vietnam, Uganda, Kenya dan lain-lain, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak. (Foto: JICA)

3: Sukarelawan JICA Mengajarkan Pelestarian Lingkungan
Tenaga Ahli Muda JICA sedang mengajarkan tentang pelestarian lingkungan terkait dengan jenis-jenis dan pemisahan sampah, di sebuah Sekolah Dasar di kaki gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. (Foto: Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)

4: Kerjasama Penelitian untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
"Proyek Pengelolaan Kebakaran dan Karbon di Lahan Gambut dan Hutan" di bawah SATREPS di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kebun Budidaya Tanaman di Taruna sedang dilakukan uji-coba pembedayaan tanaman Dipterocarpaceae yang dianggap cocok untuk lahan gambut. (Foto: Mika Tanimoto/ JICA)

5: Buku KIA yang Telah Tersebar di Indonesia
Buku KIA telah digunakan oleh lebih dari 80% ibu hamil di Indonesia. Ms. Keiko Osaki, seorang tenaga ahli JICA sedang menjelaskan tentang praktik kesehatan ibu dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar ibu-ibu dapat mengasuh dan merawat anak-anak yang sehat. Proyek ini telah berkontribusi untuk memperkuat generasi penerus dengan jalan mengasuh anak-anak yang sehat. (Foto: Kenshiro Imamura/ JICA)



6: **Pembangunan MRT dengan Teknologi Mutakhir Jepang**
 Dalam proyek MRT sebagai kereta bawah tanah pertama di Indonesia, menggunakan konstruksi Tunnel Boring Machine produksi Jepang. (Foto: JICA)

7: **Tenaga Ahli Muda yang Sedang Mengajarkan Judo**
 Tenaga Ahli Muda JICA sedang mengajarkan judo kepada murid-murid di tempat latihan judo Jakarta. (Foto: JICA)

8: **Pembangunan MRT dengan Memanfaatkan Teknologi Manajemen Konstruksi Jepang**
 Dalam proyek MRT, teknologi mutakhir manajemen konstruksi Jepang digunakan untuk meminimalkan dampak terhadap infrastruktur lalu-lintas yang telah ada. (Foto: SHIMIZU CORPORATION)

9: **Simpang Semanggi**
 Simpang Semanggi dibangun atas inisiatif Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia, untuk persiapan Asian Games yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pengerjaan konstruksinya menggunakan dana pampasan perang dari Jepang. (Foto: Anonim)

10: **Para Teknisi yang Bergembira atas Selesainya Penggalan Terowongan Drainase**
 Pembangunan Daerah Aliran Sungai Brantas merupakan contoh kesuksesan dalam pembangunan Daerah Aliran Sungai yang pertama di Indonesia. Transfer teknologi dari teknisi-teknisi Jepang kepada teknisi-teknisi Indonesia telah membangun hubungan kepercayaan yang erat, dan diungkapkan dalam kata "Spirit Brantas." (Foto: Nippon Koei Co., Ltd.)

11: **Pelatihan Kerja di Samarinda**
 Para peserta pelatihan dari Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste sedang berlatih mengoperasikan mesin berat untuk perbaikan saluran air sambil melihat monitor simulasi di Balai Latihan Kerja Samarinda, Kalimantan Timur. (Foto: JICA)

12: **Polisi Indonesia yang Sedang Mempelajari Identifikasi Kriminal**
 Polisi Indonesia sedang mempraktikkan pengambilan sidik jari dan bagaimana mendeteksi informasi di tempat kejadian perkara (TKP), di bawah bimbingan tenaga ahli dari Kepolisian Jepang. (Foto: Kenshiro Imamura/ JICA)



Japan International Cooperation Agency

Southeast Asia Division 1 Southeast Asia and Pacific Department

5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012 JAPAN Tel: +81-3-5226-6660~6663 URL: <http://www.jica.go.jp>

JICA Indonesia Office

Sentral Senayan II, 14th Floor, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270, INDONESIA +62-21-5795-2112

Foto Sampul Depan

1	2	3	4
5	6	7	8
9			

1.2.7: Kenshiro Imamura/JICA

3.6.9.Sampul Belakang: Mika Tanimoto/JICA

4: Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, Republik Indonesia

5: Kresna/ BASARNAS

8: Shinichi Kuno/JICA

